

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis simtom konflik kepentingan pengembangan desa wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Di mana studi ini untuk mengetahui tentang pengembangan pariwisata suatu daerah yang telah dikembangkan oleh banyak pihak. Penelitian tentang pengembangan pariwisata lebih ditekankan pada hubungan antara politik dan pariwisata, terutama dari sisi pariwisata dapat mengubah susunan kekuasaan dan nilai-nilai pada suatu daerah wisata. Pola-pola pariwisata dan proses-prosesnya merupakan jawaban atas nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Meskipun perkembangan pariwisata menarik dari sisi ilmu sosial, namun sebagian penelitian pariwisata hanya terfokus untuk mengkaji pariwisata dari sisi ekonomi dan pasar (*market*) saja, dengan peran utama berupa kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada perkembangan ekonomi yang disebabkan oleh pariwisata (Rizalsan dan Juwono (2020)).

Dalam studi yang menekankan pada pariwisata, biasanya hanya berpusat pada sisi ekonomi dan *market* saja, pendekatan yang dipergunakan cenderung ke pendekatan ekonomi yang sempit dan terbatas, serta bersifat fungsionalisasi, atau dekontekstualisasi (Putro and Azkarifa, 2020). Permasalahan yang terjadi dalam relasi kuasa dalam proses kebijakan pemerintah pada perkembangan ekonomi yang terkait pariwisata tidak tergambar lengkap, Ini berarti permasalahan tentang “siapa mendapatkan apa”, “di mana”, “mengapa”, dan “bagaimana” tetap tidak akan terpecahkan.

Semua bentuk pengembangan pariwisata melibatkan dominasi atas serangkaian nilai-nilai di atas nilai-nilai alternatif melalui pelaksanaan kekuasaan. Khan *et al.* (2022) berpendapat bahwa hubungan antara tuan rumah dan pengunjung dalam pariwisata hanya dapat dimengerti dalam hubungan internasional antara negara-negara berkembang dan negara-negara barat yang makmur. Sementara pengembangan pariwisata tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan kebijakan (baca; kekuasaan) dengan lingkungan sosial tempat pariwisata itu berlangsung.

Menurut Diesendorf (2000) menyatakan bahwa analisis kebijakan khusus mengenai lingkungan berkisar tentang pengidentifikasian komponen-komponen keadaan dan ciri-ciri dinamis dari suatu lingkungan, khususnya lingkungan yang terkait dengan kebijakan tersebut. Lebih lanjut bahwa suatu masalah sederhana tidak dapat dipecahkan dengan hanya menawarkan solusi teoritis yang tidak mempertimbangkan batasan-batasan yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Oleh karena itu, sangat keliru bila mempergunakan standar ideal dalam menilai alat-alat kebijakan, karena standar tersebut harus berkaitan dengan lingkungan khusus tempat alat-alat kebijakan tersebut digunakan. Dengan demikian, lingkungan tempat kebijakan umum dibuat harus mencakup nilai-nilai, norma-norma, pemahaman-pemahaman, ideologi-ideologi serta pertimbangan-pertimbangan teknis yang sesuai dengan kriteria dalam memilih kebijakan yang dijalankan. Pertimbangan faktor politik dalam aktivitas kepariwisataan terutama dalam pemanfaatan waktu senggang (*leisure time*) bukan hanya hasil dari kekuasaan ekonomi dan sosial, melainkan juga sebagai hasil dari perjuangan politik.

Studi pengembangan pariwisata dalam perspektif kelembagaan, khususnya pada kelembagaan baru, melibatkan analisis tentang bagaimana struktur, fungsi, dan peran kelembagaan dalam mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata di suatu wilayah atau negara. Berikut tujuh hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif ini:

1. Identifikasi Masalah dan Peluang. Kelembagaan baru dalam pengembangan pariwisata sering kali muncul karena adanya masalah yang belum terpecahkan atau peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal. Studi awal harus mencakup identifikasi masalah utama yang dihadapi dalam sektor pariwisata dan juga peluang yang dapat ditingkatkan.
2. Peran Kelembagaan. Analisis peran yang dimainkan oleh berbagai kelembagaan dalam industri pariwisata penting. Ini dapat mencakup pemerintah, badan pariwisata, pihak swasta, LSM, dan kelompok masyarakat setempat. Studi ini membantu dalam menentukan bagaimana peran baru dapat mengisi celah atau meningkatkan peran yang ada.
3. Struktur Organisasi. Pemahaman tentang struktur organisasi kelembagaan baru sangat penting. Ini mencakup komposisi dewan direksi, keanggotaan, hierarki, dan mekanisme pengambilan keputusan.
4. Sumber Daya. Ketersediaan sumber daya seperti anggaran, personil, dan infrastruktur juga harus dianalisis. Kelembagaan baru perlu mengidentifikasi sumber daya tambahan atau mencari cara untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efisien.

5. Kebijakan dan Regulasi. Penyelidikan tentang kerangka hukum dan regulasi yang mengatur industri pariwisata di wilayah atau negara tersebut sangat penting. Ini membantu kelembagaan baru dalam memastikan bahwa operasinya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
6. Keterlibatan Pihak Terkait. Penelitian ini juga perlu mempertimbangkan keterlibatan aktor-aktor utama dalam industri pariwisata, seperti pemilik usaha pariwisata, komunitas lokal, dan organisasi non-pemerintah. Membangun dukungan dan keterlibatan dari pihak-pihak ini adalah kunci dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
7. Evaluasi Dampak. Setelah kelembagaan baru didirikan, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi dampaknya terhadap pengembangan pariwisata. Ini melibatkan pemantauan kinerja, pengukuran pencapaian tujuan, dan penyesuaian strategi jika diperlukan.

Pengembangan pariwisata dalam perspektif kelembagaan adalah upaya yang kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, analisis yang cermat tentang aspek-aspek tersebut sangat penting dalam merancang dan mengelola kelembagaan baru untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Penekanan dalam perspektif kelembagaan baru, studi pengembangan pariwisata dapat difokuskan pada pemahaman tentang "Politik Pariwisata." Politik Pariwisata mengacu pada pemaknaan atas bagaimana kebijakan, keputusan, dan tindakan terkait pariwisata diputuskan, dirancang, dan dilaksanakan oleh aktor-aktor politik dan lembaga-lembaga terkait dalam suatu wilayah atau negara.

Pemahaman tentang Politik Pariwisata dapat memberikan wawasan yang dalam tentang cara pariwisata dikelola dan dikembangkan dalam konteks politik, dan ini mencakup enam aspek kunci:

1. Keputusan Kebijakan. Bagaimana keputusan kebijakan terkait pariwisata dibuat, oleh siapa, dengan mempertimbangkan faktor-faktor apa. Ini melibatkan analisis terhadap dinamika politik, interaksi antara berbagai pemangku kepentingan, dan peran aktor politik dalam menentukan arah kebijakan pariwisata.
2. Tujuan dan Prioritas. Bagaimana tujuan dan prioritas dalam pengembangan pariwisata dipilih dan dirumuskan. Pemahaman tentang pemaknaan di balik pilihan-pilihan ini dapat membantu mengidentifikasi apakah kebijakan pariwisata difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, pengembangan sosial, atau tujuan lainnya.
3. Alokasi Sumber Daya. Bagaimana alokasi sumber daya, termasuk anggaran, infrastruktur, dan personil, ditentukan untuk sektor pariwisata. Ini mencakup analisis terhadap bagaimana kepentingan politik dapat mempengaruhi alokasi sumber daya ini.
4. Partisipasi Masyarakat. Bagaimana partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan pariwisata dipromosikan atau dibatasi oleh politik pariwisata. Pemahaman tentang hubungan antara aktor politik dan masyarakat lokal dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana aspirasi dan kebutuhan komunitas dipertimbangkan dalam pengembangan pariwisata.

5. Dampak Sosial dan Lingkungan. Bagaimana kebijakan pariwisata memengaruhi masyarakat lokal dan lingkungan. Ini mencakup pertimbangan tentang bagaimana politik pariwisata dapat mempengaruhi keberlanjutan sosial dan lingkungan di destinasi pariwisata.
6. Keterwakilan dan Kepentingan Spesifik. Analisis tentang keterwakilan dan kepentingan kelompok-kelompok spesifik dalam politik pariwisata, termasuk industri pariwisata, kelompok masyarakat adat, kelompok lingkungan, dan sektor swasta.

Pemahaman tentang politik pariwisata penting karena mencerminkan bagaimana kebijakan dan praktik dalam industri pariwisata dikendalikan, dan bagaimana kebijakan-kebijakan ini dapat berdampak pada berbagai aspek, mulai dari ekonomi hingga budaya dan lingkungan. Analisis ini dapat membantu dalam merancang strategi kelembagaan baru yang lebih responsif dan berkelanjutan dalam mengembangkan sektor pariwisata.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang cukup signifikan bagi peningkatan ekonomi suatu negara yang secara tidak langsung berpengaruh juga pada citra positif sebuah negara. Setiap negara yang dapat menjamin keberlangsungan sektor pariwisata berdampak bagi peluang keterlibatan negara tersebut dalam even strategis di bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Dengan demikian, bidang pariwisata perlu dikelola secara serius oleh sebuah negara sehingga dapat memberikan dampak positif baik bagi lingkungan, masyarakat dapat menjaga keberlangsungan pariwisata itu sendiri serta peningkatan daya tarik regional terhadap suatu bangsa (Fasa, 2022).

Pengembangan pariwisata di Indonesia telah banyak dilakukan, misalnya di Jawa Barat, sebagai salah satu sektor yang strategis dan potensial setelah Bali dan DKI. Pengembangan pariwisata di Jawa Barat didasarkan pada posisi strategis Jawa Barat sebagai *overland*-nya Jawa dan Bali bagi wisatawan Yogya, dengan ditunjang oleh aksesibilitas yang baik. Di samping itu, objek wisata Jawa Barat lebih variatif ketimbang destinasi wisata di Jakarta yang didominasi unsur laut (Rahmawati, 2023).

Pengembangan wisata di Indonesia juga telah bergiat sejak lama. Pembangunan pariwisata dapat berjalan secara berkesinambungan apabila terjadinya sinergitas yang produktif antara pemerintah daerah (*local government*), perusahaan pariwisata (*tourism enterprises*) serta komunitas local (*local community*) (Cahyono, 2020).

Dari 11 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongodow Timur memiliki potensi *comparative advantage*, yaitu pegunungan, laut, tambang serta flora dan fauna yang endemik yang dapat menjadi kekuatan untuk penggerak ekonomi melalui sektor pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan dilakukan dengan pengembangan Desa Wisata, mengapa sektor ini yang diutamakan karena Desa merupakan aset utama dari sebuah kabupaten. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengembangan Desa Wisata memberikan kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat desa untuk membangun wilayahnya.

Pembangunan dan pengembangan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perwujudan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, membuka kesempatan kerja lapangan berusaha meningkatkan akses, dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah melalui Desa Wisata. Dalam konteks wisata pedesaan yaitu aset kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala keunikan dan daya tariknya sebagai produk wisata menarik kunjungan wisatawan ke desa (Sudibya, 2018).

1.2 Konteks Penelitian

Penelitian ini diarahkan pada pengembangan Desa Wisata yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakannya. Pada prosesnya, pengembangan Desa Wisata dapat dijabarkan dalam tahapan rintisan, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Selanjutnya data BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka 2024, memperlihatkan bahwa jumlah kunjungan wisata mancanegara dan domestik Tahun 2023 adalah 68.958 wisatawan. Namun faktanya, di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Pengembangan Desa Wisata tidak semudah itu, karena saat ini semua desa atau sebanyak 33 desa dari 35 Desa Wisata masih berstatus Desa Wisata rintisan. Fenomenanya, dari data PDRB sektor pariwisata bahwa dengan kesadaran semakin menipisnya cadangan sumber daya alam yang menjadi tumpuan industri ekstraktif, maka pemerintah dipandang perlu untuk mengembangkan sektor pariwisata untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi (Furkan dkk., 2016).

Kekayaan alam, kearifan lokal, dan keberagaman budaya yang dimiliki sebagai pondasi kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata ini diperkuat dengan dasar hukum yaitu Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Nomor 143 Tahun 2018 untuk penetapan 6 (enam) Desa Wisata dari 81 desa, yang merupakan pengewajawantahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025. Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Objek Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, jumlah potensi Objek Wisata yang ada di daerah ini yaitu Wisata Buatan 15 Lokasi dan Wisata Budaya 5 Lokasi yang semua lokasinya berdampingan dengan Wisata Alam. Lokasi. Ditambah lagi dengan penyelesaian kajian tentang RIPPARKAB 2021-2026 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Permasalahan yang terjadi antara potensi sumber daya alam dengan sumber daya manusia yaitu terletak pada kenyataan bahwa masyarakat tidak mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada untuk dimanfaatkan sebagai potensi wisata (berdasarkan *pilot test* di Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur oleh peneliti). Misalkan, dukungan pengadaan fasilitas dan prasarana masyarakat lokal yang biasanya mendorong peran serta masyarakat dan menjamin adanya akses ke sumber fisik tidak diusulkan oleh desa, padahal ini merupakan salah satu syarat untuk berkembangnya Desa Wisata.

Potensi ekonomi kreatif yang harus dikembangkan terus menerus (Maesa dan Wulandari, 2018; Indriani, 2020) yang merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269) untuk pengembangan Desa Wisata pun belum dipahami potensinya oleh masyarakat, oleh sebab itu jika daerah merencanakan ada perkembangan Desa Wisata maka ini memerlukan kebijakan politik yang kuat (Nugroho, 2004; Parson, 2006) dan itu artinya melibatkan semua pihak-pihak yang berkepentingan, artinya selama kepentingannya linier maka ini saling menguntungkan namun jika sebaliknya bisa menjadi hambatan dalam mewujudkan Desa Wisata.

Konflik kepentingan selalu menjadi pembahasan yang krusial dibahas karena jika semua sudah sesuai dengan aturan dan sesuai dengan seharusnya kenapa mewujudkan pariwisata lebih khususnya Desa Wisata tidak semudah dilakukan oleh daerah lain. Dipahami bahwa konflik kepentingan yaitu situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya (ACLC KPK). Selanjutnya, yang menjadi pembahasan lainnya dipahami bahwa untuk meminimalisir konflik kepentingan maka pembuat kebijakan harus dipisahkan atau disesuaikan dengan tingkatan jabatan yang linier.

Pemisahan bertujuan untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan pembuatan kebijakan di setiap jabatan. Tugas pokok dan fungsi yang melekat di setiap jabatan harus mampu diawasi dan dikendalikan, supaya tidak terjadi pembuatan kebijakan yang merugikan masyarakat, dan memicu konflik kepentingan terhadap suatu golongan atau kelompok tertentu (Sulistiyafani dan Sastrawan, 2021).

Penyelenggara Negara harus melaksanakan tugas sesuai jabatannya. Hal yang menjadikan penilaian kinerja di antaranya profesional, kemampuan, kewenangan dan tanggung jawab terhadap jabatannya. Pejabat publik yang profesional dapat dilihat dari bidang keahliannya yang sesuai dengan jabatan yang diampu serta, keahlian dalam mengelola tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepada pejabat tersebut. Apabila seluruh pejabat melaksanakan tugas sesuai dengan aturan maka tidak ada konflik kepentingan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja (Fuqoha, 2015). Konflik kepentingan Hal yang memicu konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah di antaranya adalah permasalahan birokrasi oleh karena itu perlu pengelolaan yang baik di instansi pemerintah.

Good Governance sangat menjunjung tinggi penerapan etika dalam bekerja, menghindari konflik kepentingan dan bekerja sesuai dengan aturan (Sulistiyafani, 2021). Penelitian ini mengidentifikasi simtom atau adanya pertanda. Diartikan sebagai alamat. pertanda, alamat, bakat, faal, firasat, gejala, gelagat, indikasi, isyarat, padahan, petunjuk, sinyal, tanda-tanda, tengara, lambang, symbol, tanda, pelebaya, semboyan, dan kial (KBBI).

Adanya simtom konflik kepentingan adalah situasi ketika ada gejala atau indikasi tercampurnya kepentingan pribadi dan kepentingan publik yang bisa menjadi akar timbulnya konflik kepentingan. Dampak besar dari praktik konflik kepentingan yaitu penyalahgunaan kekuasaan hingga melupakan tugas utama pejabat publik yaitu untuk melayani kebutuhan masyarakat (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015-12-01). Meskipun, dalam pengendalian konflik kepentingan sudah diatur dalam rambu-rambu hukum dan etika, namun di dalam lembaga pemerintah, legislatif, yudikatif, institusi profesi, dan kegiatan bisnis konflik kepentingan masih sering terjadi. Tujuannya, untuk mencari keuntungan pribadi dan golongan melalui kewenangan dan pembuatan kebijakan yang berpihak kepada pribadi atau yang berkepentingan (Marzuki, 2017). Dampak lainnya yang ditimbulkan oleh konflik kepentingan yaitu terhadap pengambilan keputusan yang tidak objektif.

Definisi simtom (atau gejala) adalah tanda-tanda atau indikasi yang membahas adanya suatu kondisi, masalah, atau penyakit tertentu. Simtom dapat berupa fenomena atau perilaku yang dapat diamati dan memberikan informasi tentang suatu keadaan yang sedang terjadi. Definisi Simtom Konflik Kepentingan dalam Pengembangan Desa Wisata, simtom konflik kepentingan dalam konteks pengembangan Desa Wisata mengacu pada tanda-tanda atau gejala yang mengindikasikan adanya situasi di mana terdapat benturan atau pertentangan antara kepentingan yang berbeda-beda dari para pihak yang terlibat dalam proses pengembangan Desa Wisata.

Lima contoh simtom konflik kepentingan dalam pengembangan Desa Wisata:

1. Adanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang tidak selaras dengan kepentingan masyarakat desa secara umum.
2. Keterlibatan pihak pemerintah atau pengusaha dalam proyek pengembangan Desa Wisata yang dapat menguntungkan mereka secara pribadi.
3. Perbedaan pandangan antara masyarakat desa, pemerintah daerah, dan investor terkait arah dan prioritas pengembangan Desa Wisata.
4. Pengambilan keputusan yang cenderung mengutamakan kepentingan komersial dibandingkan dengan pelestarian budaya dan lingkungan desa.
5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana atau sumber daya untuk pengembangan Desa Wisata.

Simtom itu bukan konflik itu sendiri. Simtom adalah tanda-tanda atau indikasi yang membahas adanya suatu kondisi atau masalah, dalam hal ini yaitu konflik kepentingan. Terkait konflik kepentingan dalam pengembangan Desa Wisata, simtom-simtom yang dapat muncul dapat berupa konflik yang bersifat:

1. Konflik laten vs konflik manifest.

Konflik laten adalah konflik yang belum benar-benar muncul ke permukaan, tetapi terdapat indikasi-indikasi atau gejala-gejala yang membahas adanya potensi konflik di Desa Wisata. Konflik manifest adalah konflik yang sudah benar-benar terjadi dan terlihat dengan jelas.

2. Konflik tertutup vs konflik terbuka

Konflik tertutup adalah konflik yang tidak tampak di permukaan, namun ada indikasi-indikasi tertentu yang mengindikasikan adanya konflik. Konflik terbuka adalah konflik yang sudah diekspresikan dan terlihat secara jelas oleh pihak-pihak yang terlibat.

Pariwisata saat ini menjadi *leading sector* menghadapi Pandemi Covid 19 karena bagi pemerintah sektor pariwisata dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar (Rohmah, 2020) dan bagi masyarakat adanya sebuah objek wisata mampu memberikan hiburan ditengah rutinitas sehari-hari, jika kedua hal ini dikolaborasikan artinya pariwisata dapat memberikan solusi yang baik dan memiliki *multiplier effect* bagi pertumbuhan perekonomian di desa saat Pandemi Covid 19 (Purba dkk., 2021) hal ini juga berarti pentingnya pembangunan politik.

Pembangunan politik menjadi dasar dalam menyatukan persepsi antara tujuan Pye (1966) mengumpulkan ciri-ciri utama dan mengidentifikasi tiga level atribut dalam mendefinisikan pembangunan politik, yaitu persamaan (*equality*), kapasitas (*capacity*), dan diferensiasi (*differentiation*). Pertama, persamaan atau equality ini mengacu pada penyelesaian masalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik juga berhubungan dengan implementasi hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa memandang golongan, artinya hukum bersifat universal.

Kedua, kapasitas bersangkutan dengan kemampuan sistem politik untuk mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti efektifitas dan efisiensi implementasi kebijakan. Aspek ini menganalisis kapasitas pemerintah dan kondisi yang mempengaruhi kinerja dalam membangun gagasan pembangunan politik. Ketiga, diferensiasi atau differentiation bersangkutan dengan pembagian kekuasaan dalam hal spesialisasi struktur serta fungsi jabatan dan badanbadan pemerintahan sehingga memiliki fungsi yang bekerja sesuai dengan *jobdesc* masing-masing dan terbatas karena adanya integrasi di dalam pemerintahan.

Reseach gap pada penelitian ini terkait dengan sektor pariwisata yaitu antara lain, dilakukan oleh Rahma (2020), yang menemukan tentang bagaimana adaptasi kebijakan ekonomi suatu negara dapat memengaruhi pariwisata. Selanjutnya penting untuk mengevaluasi kembali setiap tahapan kebijakan walaupun bukan berarti langsung mengganti dengan kebijakan yang baru. Hal tersebut disebabkan oleh kajian ulang perencanaan pembangunan ekonomi tidak berarti merubah total perencanaan, namun menambahkan sebagian sesuai dengan kondisi yang ada saat ini dengan lebih fleksibel (Pambudi, 2020). Penemuan tersebut kontradiksi dengan penelitian dari Mapahena (2020) tentang implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Selat Lembe Kecamatan Lembe Selatan Kota Bitung bahwa kebijakan pariwisata yang ditetapkan belum sepenuhnya dapat diadaptasi, karena terdapat temuan bahwa pengembangan objek wisata belum terlaksana dengan baik karena sulitnya menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar dalam hal kerjasama pemeliharaan dan penunjang fasilitas pembangunan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Irawati dkk. (2019) lebih cenderung menggunakan pendekatan *top-down*. Akibatnya efektifitas implementasi kebijakan pengembangan pariwisata partisipasi bagi masyarakat sangat terbatas (Christian, 2019). Serta dipengaruhi oleh kinerja implementator kebijakan yang belum optimal, terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia, egosektoral yang masih sangat kuat, sehingga koordinasi dan komunikasi tidak berjalan efektif. Diperparah lagi kurangnya dampak pariwisata terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang membungkus sirkulasi kehidupan masyarakat yang kemudian, berdampak pada kecenderungan memberikan kesan menghalangi terjadinya implementasi kebijakan yang efektif.

Hal serupa juga diperkuat oleh Hermawan dan Hutagalung (2019) bahwa pelaksanaan pembangunan bidang kepariwisataan selama ini menghadapi masalah pokok yaitu: keterbatasan SDM kepariwisataan, baik secara kuantitas maupun kualitas (kompeten dan profesional), diikuti lagi belum baiknya infrastruktur (sarana dan prasarana), khususnya akses jalan dan jaringan transportasi, menuju destinasi wisata sehingga berpengaruh terhadap kinerja sektor kepariwisataan; koordinasi lintas-instansi dan lintas-pelaku yang belum optimal. Hal ini sungguh ironis karena pentingnya membangun infrastruktur sebagai salah satu syarat pengembangan pariwisata. Diperlukan perencanaan dan teknik yang tepat guna untuk menjamin keberhasilan dalam pengembangan Desa Wisata (Sugiarto dan Mahagangga, 2020; Mujanah dkk., 2015) dan diperlukan kekuasaan atau kekuatan politik dengan pemetaan kepentingan setiap yang terlibat.

Alasan penelitian ini penting dilakukan (selain berdasarkan fenomena *gap* dan *research gap*) yaitu: pertama, pengembangan Pariwisata merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 11 tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa pemerintah bersama lembaga yang terkait kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan, namun kenyataannya tak semudah aturan dan tahapan yang tercantum, tetap saja mengalami kendala lapangan dalam mewujudkannya maka terindikasi bahwa dalam mewujudkan Desa Wisata penting di uji dari sisi politis. Kedua, pentingnya politik pariwisata yang diintervensi secara akselerasi untuk pengembangan Desa Wisata di saat pandemi Covid 19.

Ketiga, keunikan objek penelitian yaitu pada Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena memiliki potensi wisata alam, wisata buatan, wisata budaya. Keempat, karena Visi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang Aman, Berbudaya, dan Sejahtera melalui Sinergitas Pembangunan Perdesaan”. Didukung juga dengan Misi kedua yaitu “Meningkatkan Budaya dan Pariwisata yang Berkearifan Lokal”, maka penting diteliti kebijakan untuk menjadi referensi kedepan ketika pemerintah membuat kebijakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

1.3 Perumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan pokok masalah yang penting dari fenomena gap dan research gap yaitu “bagaimanakah politik pariwisata yang meliputi simtom konflik kepentingan dalam pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur” dengan pertanyaan penelitian yang mencakup:

1. Bagaimana kekuasaan bupati dalam membuat kebijakan untuk mewujudkan pengembangan Desa Wisata?
2. Bagaimana simtom konflik kepentingan pada perencanaan dan penganggaran dalam pengembangan Desa Wisata?
3. Bagaimana strategi mengatasi simtom konflik kepentingan dalam pengembangan Desa Wisata?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis politik dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalam pengembangan Desa Wisata seperti untuk eksekutif, legislatif dan BUMDes, juga masyarakat Desa dan organisasi masyarakat yang terlibat serta apa ada konflik kepentingan didalamnya? yang dapat terbukti melalui pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan perumusan masalah, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan kekuasaan bupati dalam membuat kebijakan untuk mewujudkan pengembangan Desa Wisata.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana simtom konflik kepentingan pada perencanaan dan penganggaran dalam pengembangan Desa Wisata.

3. Untuk menganalisis dan menjelaskan strategi mengatasi simtom konflik kepentingan dalam pengembangan Desa Wisata.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam segi akademis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritik dan Akademis.

- a. Pengembangan kerangka konseptual, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori politik pariwisata dengan dinamika konflik kepentingan dalam konteks pengembangan Desa Wisata. Melalui analisis mendalam tentang interaksi antara berbagai pemangku kepentingan, studi ini dapat memperkaya pemahaman teoretis tentang bagaimana kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan yang beragam membentuk kebijakan dan praktik pengembangan pariwisata di tingkat desa. Hal ini dapat membantu mengisi kesenjangan dalam literatur akademis mengenai politik mikro dalam pengembangan pariwisata pedesaan.
- b. Eksplorasi simtom konflik dalam konteks lokal, dengan fokus pada simtom konflik kepentingan, penelitian ini menawarkan wawasan berharga tentang manifestasi awal dan indikator simtom konflik dalam pengembangan Desa Wisata. Eksplorasi ini dapat memperdalam pemahaman akademis tentang bagaimana konflik terbentuk, berkembang, dan memengaruhi dinamika sosial-ekonomi di komunitas pedesaan. Hasil penelitian dapat berkontribusi pada pengembangan model teoretis untuk mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan dalam inisiatif pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

c. Kontribusi pada studi interdisipliner, penelitian ini menjembatani studi terkait ilmu politik, studi pariwisata, sosiologi pedesaan, dan manajemen konflik. Pendekatan interdisipliner ini dapat memperkaya *discourse* akademis dengan menyediakan perspektif yang lebih holistik dan nuansa tentang kompleksitas pengembangan Desa Wisata. Hal ini dapat mendorong kolaborasi lintas disiplin dalam penelitian pariwisata dan pengembangan pedesaan, serta membuka jalur baru untuk penyelidikan akademis yang mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis.

2. Manfaat Praktis

a. Peningkatan Strategi Pengelolaan Konflik. Penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan dan pengelola Desa Wisata dalam mengidentifikasi dan menangani simtom awal konflik kepentingan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik lokal dan potensi sumber konflik, para pemangku kepentingan dapat mengembangkan strategi pencegahan dan resolusi konflik yang lebih efektif. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan dan inklusif, mengurangi risiko kegagalan proyek akibat konflik internal, serta meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam inisiatif pariwisata.

b. Optimalisasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan kebijakan pengembangan Desa Wisata yang lebih responsif terhadap realitas politik lokal. Dengan memahami

kompleksitas kepentingan berbagai pihak, pembuat kebijakan dapat merancang program dan regulasi yang lebih seimbang, adil, dan mampu mengakomodasi beragam kepentingan tanpa mengorbankan tujuan pembangunan pariwisata. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, mengurangi resistensi masyarakat, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang lebih berkelanjutan di tingkat desa.

- c. Pemberdayaan Masyarakat Lokal. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat yang lebih tepat sasaran dalam konteks pengembangan Desa Wisata. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kekuasaan dan kepentingan di tingkat lokal, program pemberdayaan dapat dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi secara aktif dan setara dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata di desa mereka. Ini dapat mencakup pelatihan manajemen konflik, pendidikan politik praktis, dan pengembangan keterampilan negosiasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan resiliensi komunitas dan memastikan distribusi manfaat pariwisata yang lebih merata di antara anggota masyarakat.

1.5 Konseptual Teoritik

1.5.1 Pendekatan Institusionalisme Baru

Pendekatan institusionalisme baru (*the new institutionalism*) merupakan pendekatan yang relatif muda dan berkembang dalam ilmu politik. Pendekatan yang mulai tumbuh dan berkembang sejak dekade 1970-an ini tidak hanya mempelajari politik dari aspek normatif dan institusional sebagaimana pendekatan institusionalisme lama atau yang dikenal juga dengan nama tradisionalisme.

Institusionalisme baru juga memperhatikan aspek perilaku individu, gagasan, konflik, hingga struktur ekonomi dan politik (Kosandi, 2015). Institusionalisme baru lebih merupakan suatu visi yang meliputi pendekatan lain, berbeda dengan institusionalisme lama yang memandang institusi sebagai suatu hal yang statis dan terstruktur. Pendekatan institusionalisme baru memandang institusi sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu melalui aturan main (*rules of the game*). Institusionalisme baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan *behavioralis* atau perilaku yang melihat politik dan pengambilan kebijakan sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau organisasi, dan institusi hanya mencerminkan kegiatan organisasi itu (Budiardjo, 2008). Para pendukung pendekatan institusionalisme baru ini secara umum berpandangan bahwa mempelajari institusi sangat penting karena institusi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi (*contributing factor*) peristiwa, perilaku dan perubahan politik. Meskipun bukan lagi dipandang sebagai faktor determinan, namun institusi tetap diperlakukan sebagai salah satu faktor yang penting di dalam studi politik.

Dari segi metodologi, pendekatan institusionalisme baru tidak lagi menggunakan metodologi tradisionalisme, tetapi berkembang mengikuti perkembangan metodologi di dalam ilmu sosial lainnya (Kosandi, 2015). Pendekatan institusionalisme baru sebenarnya dibangun di atas institusionalisme tradisional, dalam konteks kerangka teoritis yang lebih modern melalui enam garis perbedaan analisis yaitu: (1). Dari fokus terhadap organisasi menuju fokus pada peraturan. (2). Dari konsepsi formal tentang institusi menuju yang informal. (3). Dari konsepsi statis tentang institusi menuju konsep dinamis. (4). Dari bertumpu dalam nilai menjadi posisi kritis terhadap nilai. (5). Dari konsepsi institusi holistik menjadi terpisah-pisah. (6). Dari independensi menjadi kemelekatan (Marsh dan Stoker, 2002). Adapun inti dari

Pendekatan institusionalisme baru dirumuskan oleh Goodin (1996) sebagai berikut:

1. Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif.
2. Pembatasan-pembatasan itu terdiri dari institusi-institusi, yaitu pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial dan perilaku dari mereka yang memegang peran itu, telah ditentukan secara sosial dan mengalami perubahan terus-menerus.
3. Sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek mereka masing-masing.

4. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok, juga memengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari aktor dan kelompok-kelompok.
5. Pembatasan-pembatasan ini mempunyai akar historis, sebagai peninggalan dari tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu.
6. Pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masing-masing (Goddin, 1996).

Pokok masalah pendekatan institusionalisme baru ialah bagaimana membentuk institusi yang dapat menghimpun secara efektif sebanyak preferensi dari para aktor untuk menentukan kepentingan kolektif. Dalam usaha menentukan institusi yang terbaik terjadi wacana dalam masyarakat mengenai cara bagaimana mengubah institusi yang ada menjadi lebih demokratis. Proses ini dapat disebut rekayasa institusional melalui suatu rancangan institusional. Suatu rancangan adalah ciptaan dari suatu rencana aksi untuk meraih hasil-hasil yang bernilai dalam konteks tertentu.

Bagi institusionalisme baru, institusi politik memainkan peran yang lebih otonom dalam membentuk kebijakan, di mana organisasi politik membuat suatu perbedaan dalam kehidupan politik dengan menggunakan langkah-langkah berupa eliminasi kepentingan. Kemampuan aktor individu mempengaruhi bentuk dan berfungsinya institusi politik yang relatif otonom. Sebaliknya, institusi-institusi juga mampu mempengaruhi dan menentukan aktor yang sah, jumlah aktor, dan aktor yang menentukan tindakan.

Pokok permasalahan dalam pendekatan ini menurutnya ialah bagaimana membentuk institusi yang dapat menghimpun secara efektif sebanyak preferensi dari para aktor untuk menentukan kepentingan kolektif dalam sebuah keputusan (Marsh dan Stoker, 2002). Hall dan Taylor membagi pendekatan institusionalisme baru ke dalam tiga kelompok teori (Kosandi, 2015), yaitu institusionalisme historis (*historical institutionalism*), institusionalisme sosiologis (*sociological institutionalism*), dan institusionalisme pilihan rasional (*rational choice institutionalism*).

1.5.1.1 Institusionalisme Historis

Pendekatan yang *eclectic* untuk mempertimbangkan faktor gagasan, perilaku individu, maupun pengaruh struktur di dalam interaksi politik yang melibatkan institusi. Di dalam studi politik, pada umumnya faktor-faktor tersebut dipelajari dengan pendekatan yang berbeda-beda. Faktor gagasan umumnya dipelajari dengan pendekatan normatif atau dekonstruktif. Faktor perilaku individu umumnya dipelajari dengan pendekatan *behavioral (positivisme)* atau pilihan rasional. Sedangkan faktor struktur pada umumnya dipelajari dengan pendekatan Marxisme, teori elite, atau realisme. Para ilmuwan yang bersentuhan dengan institusionalisme historis berusaha untuk berpikir terbuka terhadap berlakunya berbagai faktor tersebut dan tidak membatasi analisisnya hanya pada faktor tertentu saja. Mereka menekankan bahwa studi ilmu politik seharusnya lebih difokuskan pada sejarah mengenai apa yang terjadi, apa yang dipikirkan dan apa yang dicitrakan; bukannya berpegang terlalu ketat pada kerangka teorietis.

Inilah yang membuat mereka disebut sebagai institusionalisme “historis” karena bagi mereka “*history matters*”. Perubahan yang terjadi dalam suatu proses institusionalisasi seperti pembuatan kebijakan, pola proses dan hasilnya bisa berbeda-beda setiap kasus, atau disebut juga *path dependent*. Oleh karena itu, analisis kontekstual historis terhadap suatu proses institusionalisasi dan dampaknya perlu dilakukan untuk dapat benar-benar memahami suatu peristiwa, perilaku atau perubahan politik.

Bagi para ilmuwan yang bersentuhan dengan institusionalisme historis, suatu proses institusionalisasi dapat terjadi dari hubungan kekuasaan yang asimetris. Suatu institusi dapat terbentuk, beroperasi dan berkembang karena hubungan kekuasaan yang asimetris. Dalam sebuah hubungan kekuasaan yang asimetris, institusi menjalankan fungsi memelihara *status quo* atau membuat perubahan dan membangun perimbangan kekuasaan baru. Hal ini karena institusi cenderung mendistribusikan kekuasaan secara tidak merata kepada kelompok-kelompok masyarakat. Dalam hubungan kekuasaan yang tidak merata (asimetris) tersebut, manusia membentuk koalisi-koalisi dan bersaing antara satu koalisi dengan yang lainnya (Marsh *et al.*, 2002). Dengan demikian institusi selalu mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Jika pada suatu waktu terjadi relasi kekuasaan asimetris antara kelompok, kemudian terbentuk institusi untuk mengatur pola relasi kekuasaan baru yang juga asimetris, maka institusi tersebut dipersoalkan karena menghasilkan pola relasi kekuasaan yang asimetris.

1.5.1.2 Institusionalisme Sosiologis

Berpandangan bahwa studi politik harus mencakup tidak hanya aturanaturan formal, aspek kognitif, dan kerangka moral, namun juga kerangka pedoman bagi tindakan manusia. Dalam perspektif ini, terdapat tumpang tindih pengertian antara institusi dengan budaya. Kajian institusi yang sering dipandang berbeda karena berdasarkan struktur dan organisasi, dibandingkan dengan kajian budaya yang berdasarkan pemahaman tentang nilai-nilai, sikap dan perilaku bersama; dalam perspektif institusionalisme sosiologis ini sama dengan budaya. Budaya sendiri dipandang sebagai institusi. Di sinilah letak relevansi nomenklatur 'sosiologi' yang dilekatkan pada institusionalisme dalam perspektif ini, karena adanya penekanan dalam perspektif ini untuk mempelajari dimensi kognitif dari institusi. Institusi dipelajari dari pola perilaku, simbol-simbol, norma yang memberi pedoman bagi perilaku, dan identitas. Model perspektif ini memiliki kemiripan dengan salah satu kecenderungan studi dalam sosiologi, yaitu konstruktivisme sosial (*social constructivism*).

Institusionalisme sosiologis memandang bahwa institusi mempengaruhi individu, termasuk dalam hal preferensi dan identitasnya. Berlawanan dengan teori pilihan rasional yang mengatakan bahwa perilaku politik manusia didorong oleh kepentingan obyektif (*interest-driven*), kalangan penganut teori institusionalisme sosiologis cenderung berpandangan bahwa justru institusi yang membentuk preferensi dan identitas individu. Hal ini karena di dalam praktiknya tidak semua institusi dan organisasi dibentuk untuk memaksimalkan kepentingan obyektif atau material.

Banyak diantaranya dibentuk berdasarkan budaya atau nilai-nilai bersama. Dalam kaitannya dengan identitas, menurut teori ini, umumnya institusi dibentuk bersifat isomorfis, yaitu berdasarkan kesamaan identitas, preferensi kebijakan atau posisi di dalam struktur. Institusi membentuk preferensi dan identitas karena individu ingin berperilaku sesuai dengan lingkungan sosialnya (*the logic of social appropriateness*), bukan hanya karena perhitungan strategis berdasarkan kepentingan ekonomi atau kekuasaan.

Dalam proses pembentukan institusi baru atau revisi institusi lama, dorongan yang lebih kuat memotivasi perubahan menurut teori ini adalah legitimasi sosial. Perubahan institusi dilakukan bukan semata-mata perhitungan efisiensi, tetapi lebih dari itu, karena perubahan itu sendiri dihargai oleh masyarakat. Karena masyarakat menghargai efisiensi lah maka perubahan tersebut dilakukan, misalnya dalam kebijakan subsidi pendidikan, kesehatan atau pangan, maka efisiensi tidak diinginkan. Perubahan dengan mengurangi subsidi menjadi tidak berharga dan tidak memotivasi pemerintah untuk melakukannya.

1.5.1.3 Institusionalisme Pilihan Rasional

Memandang proses institusionalisasi sebagai suatu mekanisme instrumental untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama (*collective action dilemmas*). Manusia secara individual dipandang sebagai individu rasional yang bertindak atas dorongan kepentingan rasional.

Setiap tindakan politik dari para aktor rasional tersebut didasari oleh perhitungan untung-rugi dan aksi-reaksi dari aktor lainnya. Interaksi di antara aktor-aktor rasional ini dapat menimbulkan persaingan dan konflik yang pada gilirannya berdampak pada kepentingan banyak orang. Pembentukan institusi pada umumnya dipandang sebagai agen untuk menyelesaikan masalah kolektif, termasuk konflik dan distribusi nilai.

Bagi para penganut institusionalisme pilihan rasional, para aktor politik lebih cenderung untuk memilih institusionalisasi daripada kekosongan institusi (Shepsle *et al.*, 2008). Kehadiran institusi memberikan insentif bagi kerjasama dan pertukaran (*gains from cooperation* dan *gains from exchange*) karena menghindarkan para aktor politik dari ketidakpastian hasil dari persaingan dan konflik di antara mereka. Dengan saling bekerjasama dan bertukar informasi, dapat terjalin koordinasi yang memastikan ekuilibrium dan mengurangi biaya transaksi politik (*political transactional cost*).

Konsepsi ekuilibrium di sini dikenal dengan nama '*ekuilibrium Nash*', yaitu suatu kondisi di mana ketika salah satu aktor menikmati keuntungan (*better off*), tidak ada aktor lain yang dirugikan (*worse off*). Oleh karena itulah manusia cenderung untuk memilih institusionalisasi juga manusia cenderung untuk patuh kepada institusi sepanjang ekuilibrium terpelihara. Tetapi sebaliknya, jika ekuilibrium terganggu, dalam arti ada pihak yang dirugikan, para aktor menuntut revisi pada institusi atau membentuk institusi baru. Institusionalisme pilihan rasional melihat keseimbangan institusional sebagai norma atau aturan, baik formal maupun informal, yang disepakati bersama.

Teori ini melihat bahwa keadaan normal politik adalah di mana aturan permainan yang stabil dan para aktor memaksimalkan keuntungan (biasanya keuntungan pribadi) yang diberikan oleh aturan-aturan tersebut. Para aktor mempelajari aturan-aturan, strategi adaptasi, dan dengan demikian melahirkan keseimbangan institusional. Meski tidak semua aktor merasa senang atau diuntungkan dengan struktur kelembagaan yang terbentuk, tetapi yang menjadi tujuan adalah pada kondisi yang stabil. Setelah stabil, sangat sulit untuk mengubah aturan karena tidak ada yang bisa memastikan hasil dari struktur yang terbentuk.

Pendekatan dalam studi ilmu politik, lebih besar terhadap dinamika tentang terbentuknya organisasi dan hubungan antara berbagai elemen atau faksi yang berbeda di dalamnya. Masalah bagi ketiga institusionalisme baru yang lebih tua untuk mengembangkan penjelasan yang mempertimbangkan institusi, institusi yang mereka definisikan memiliki kecenderungan untuk terlalu "lengket", dan agen (jika ada) sebagian besar telah ditetapkan dalam hal preferensi atau terpaku dalam hal norma. Peralihan ke ide dan wacana oleh para sarjana dalam ketiga institusionalisme baru mewakili upaya mereka untuk melepaskan institusi dan untuk melepaskan preferensi dan norma. Namun, mereka telah menantang premis dasar dari institusionalisme baru yang lebih lama. Tantangannya adalah ontologis (tentang apa itu institusi dan bagaimana institusi diciptakan, dipertahankan, dan diubah) dan epistemologis (tentang apa yang dapat kita ketahui tentang institusi dan apa yang membuatnya berlanjut atau berubah sehubungan dengan kepentingan dan norma). Inilah yang dikenal sebagai institusionalisme diskursif.

1.5.1.4 Institusionalisme Diskursif

Pandangan ini terdiri dari gagasan dan wacana. Ide berbeda dalam tingkat keumuman: Mereka khusus untuk kebijakan, mencakup program yang lebih luas, atau merupakan filosofi yang mendasarinya. Mereka juga berbeda dalam jenisnya: Gagasan kognitif adalah konstitutif dari minat dan gagasan normatif menarik bagi nilai. Wacana berfungsi tidak hanya untuk merepresentasikan ide tetapi juga untuk menukarnya melalui proses interaktif (a) koordinasi antar aktor kebijakan dalam konstruksi kebijakan dan program dan (b) komunikasi antara aktor politik dan publik dalam presentasi, musyawarah, dan legitimasi ide-ide tersebut, dengan latar belakang filosofi menyeluruh. Konteks kelembagaan juga penting baik konteks kelembagaan formal (politik sederhana cenderung memiliki wacana komunikatif yang lebih rumit, politi majemuk wacana koordinatif yang lebih rumit) dan konteks makna yang lebih spesifik. Institusionalisme diskursif berbeda dari tiga institusionalisme baru yang lebih tua dalam hal logikanya maupun objek penjelasannya.

Pertama, institusi dalam institusionalisme diskursif, alih-alih berfungsi sebagai struktur eksternal untuk mengikuti aturan, secara bersamaan merupakan struktur dan konstruksi internal bagi agen itu sendiri. Kemampuan ideasional latar belakang agen mereka untuk bertindak dalam konteks makna tertentu untuk menciptakan dan memelihara institusi sementara kemampuan diskursif latar depan mereka berkomunikasi secara kritis tentang institusi tersebut dan dengan demikian mengubah atau mempertahankannya.

Perubahan institusional dalam institusionalisme diskursif, berlawanan dengan institusionalisme historis, bersifat dinamis dan dapat dijelaskan sepanjang waktu melalui gagasan dan wacana agen, daripada sebagian besar statis karena struktur yang bergantung pada jalur dan momen kritis yang tidak dapat dijelaskan.

Kedua, kepentingan dalam institusionalisme diskursif, berlawanan dengan institusionalisme pilihan rasional, tidak bersifat objektif (karena kepentingan adalah ide dan, dengan demikian, subjektif) maupun material. Namun, institusionalis diskursif tidak menyerah pada ketidakpastian total atau menyangkal adanya realitas material di luar sana, karena kepentingan subjektif maupun institusi bisa jadi nyata meski bukan material. Ketiga, norma-norma dalam institusionalisme diskursif, berlawanan dengan institusionalisme sosiologis, merupakan konstruksi dinamis daripada struktur statis. Di sini, intersubjektivitas konstruksi ideasional normatif dan interaksi diskursif menjaga relativisme.

1.5.2 Politik Pariwisata

Pariwisata tumbuh dan berkembang di tengah-tengah perubahan politik yang sangat terpengaruh oleh waktu dan ruang. Ketika kapitalis mengalami perubahan bentuk dan strukturnya, pariwisata juga mengalami perubahan bentuk dan struktur dalam jumlah yang besar. Dengan demikian berarti bahwa memahami pariwisata tidak dapat terlepas dari pemahaman tentang kapitalis.

Ritzer (1912) menemukan bahwa pariwisata massal (*mass tourism*) merupakan contoh yang baik untuk menjelaskan industri kapitalis modern dan fenomena sosiokultural. Industri kapitalisme bangsa barat telah mengalami perubahan struktur yang sangat tajam sekitar Tahun 1980-an dengan adanya pergeseran-pergeseran dari regional, nasional dan internasional dalam kesempatan meningkatkan modal dan kesempatan kerja. Dalam pergeseran tersebut, pariwisata merupakan suatu komponen yang penting dan dianggap sebagai post industrialisme atau *post fordisme*.

Menurut Prasiasa (2011:13) *post fordisme* mengarah pada sebuah model regulasi sosial dan politik yang menstabilkan hubungan antara konsumsi dan akumulasi, yakni antara berapa banyak yang dibelanjakan konsumen atau wisatawan dengan berapa banyak yang diperoleh industri pariwisata.

Pariwisata merupakan bagian dari globalisasi ekonomi internasional, mandiri dan berjaringan luas dengan ketergantungan yang semakin berkurang terhadap negara sebagai satuan organisasi ekonomi internasional. Dengan adanya perubahan ekonomi yang sangat dramatis itu berpengaruh pada budaya yang mengarah pada perpecahan (*fragmentasi*), citra, bentuk pertunjukan, kekuasaan pasar dan pandangan wisatawan berpengaruh besar terhadap pengalaman wisatawan dalam berwisata (Urry, 1990). Kajian masyarakat kapitalis dalam pengembangan pariwisata lebih ditekankan pada hubungan antara politik dan pariwisata, terutama dari segi bagaimana pariwisata dapat mengubah susunan kekuasaan dan nilai-nilai pada suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) dan sebaliknya.

Pola-pola pariwisata dan proses-prosesnya merupakan jawaban atas nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Meskipun perkembangan pariwisata menarik dari sisi ilmu sosial, namun sebagian penelitian pariwisata hanya terfokus untuk mengkaji pariwisata dari sisi ekonomi dan pasar (*market*) saja, dengan peran utama berupa kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada perkembangan ekonomi yang disebabkan oleh pariwisata (Williams *and* Shaw, 1991).

Fokus penelitian pariwisata yang hanya berpusat pada sisi ekonomi dan market tersebut, terlihat bahwa pendekatan yang dipergunakan cenderung merupakan pendekatan ekonomi yang sempit, bersifat fungsionalisasi dan dekontekstualisasi (Richter, 1989). Contohnya, ketika penelitian dapat mempertimbangkan dampak ekonomi kotor maupun bersih dalam permintaan dan penawaran produk pariwisata, permasalahan mengenai pemerataan tenaga kerja yang ada dan pendapatan serta waktu luang (*leisure time*) di Daerah Tujuan Wisata dan daerah-daerah lainnya yang sedang berkembang tidak banyak dibicarakan.

Semua bentuk pengembangan pariwisata melibatkan dominasi atas serangkaian nilai-nilai di atas sejumlah nilai-nilai alternatif melalui pelaksanaan kekuasaan. Craik (1991) berpendapat bahwa hubungan antara tuan rumah dan pengunjung dalam pariwisata hanya dapat dimengerti dalam konteks hubungan internasional antara negara-negara berkembang dan negara-negara barat yang makmur. Dengan demikian, kebijakan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial tempat pariwisata itu berlangsung.

Britton (1991) menempatkan kritik sosial pada pariwisata dalam kerangka masyarakat kapitalis, di samping itu Urry (1990) menyatakan bahwa konsumsi jasa pariwisata tidak dapat dipisahkan dari hubungan-hubungan sosial yang terkait di dalamnya. Oleh karenanya, pertimbangan faktor politik dalam aktivitas kepariwisataan terutama dalam pemanfaatan waktu senggang (*leisure time*) bukan semata-mata hasil dari kekuasaan ekonomi dan sosial, melainkan juga sebagai hasil dari perjuangan politik.

Waktu senggang (*leisure time*) tidak hanya sekedar waktu bebas dari pekerjaan rutin, tetapi sudah merupakan suatu komoditi (Aswandi 2021). Dalam masyarakat kapitalis, waktu senggang masyarakat dibentuk secara langsung dengan apa yang ditawarkan oleh “industri budaya”. Dalam kondisi seperti ini, negara melihat sebagai upaya penyesuaian dan pemberian dukungan kepada industri budaya masyarakat merasakan kesan dari tindakan-tindakan politiknya (Wilson, 1990). Ideologi yang dibentuk adalah hanya melegitimasi hubungan antara industri kebudayaan dengan ideologi yang dominan. Pada akhirnya, ideologi semacam ini membantu mengabadikan bahwa bersenang-senang dan dihibur benar-benar merupakan kemurahan hati dari akibat-akibat politiknya (Wilson, 1990).

Dalam *the three player* atau *the three actor* industri pariwisata, tampil negara (*state*), masyarakat (*civil society*), dan pasar (*market*). Berbicara masalah pasar berarti juga berbicara konsumen dalam hal ini wisatawan. Dalam konteks politik pariwisata, ideologi mengenai “kekuasaan konsumen” juga mendorong serta menghargai atas pilihan *leisure time* sebagai kebebasan perseorangan.

Pemahaman politik yang dikaitkan dengan adanya dominasi dan pengawasan, seharusnya politik pariwisata dijauhkan dari modal yang terkait dengan *leisure time*. Seharusnya pula para birokrat mengarahkan pada pemanfaatan *leisure time* pada kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik. Selain *leisure time*, salah satu aspek penting yang terjadi sekarang ini adalah dijadikannya berbagai tempat sebagai komoditi pariwisata yang berupa daya tarik wisata. Hal ini terjadi sebagai dampak dari pemikiran tentang globalisasi pasar pariwisata sebagai akibat kapitalisasi dan komodifikasi. Sistem produksi pariwisata secara bersama-sama “menjual” tempat-tempat untuk menarik wisatawan, sarana-sarana pariwisata dibuat untuk melengkapi promosi penjualan yang dilakukan, dengan tujuan untuk memberikan pengalaman yang berkualitas kepada wisatawan. Ini berarti bahwa suatu tempat dibuat menjadi sebuah komoditi dan diubah menjadi suatu pengalaman dan citra untuk dinikmati dan dikonsumsi oleh wisatawan.

Pembuatan tempat peristirahatan (*stop over*) pada lokasi tertentu pada jalur wisata yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lain dapat mengkonsolidasikan hubungan produksi yang ada. Perbedaan itu mencerminkan hierarki dari lingkup liburan dan kelas-kelas sosial. Menurut Cater (1987) perbedaan kelas dapat digolongkan secara tidak sejajar satu dengan lainnya, dalam hal produksi, kekayaan dan kekuasaan, sehingga dapat menimbulkan pertentangan satu dengan lainnya dalam hal dominasi dan subordinasi. Oleh karenanya, dalam politik pariwisata tidak hanya terkonsentrasi pada satu aspek yang mencakup lingkungan publik, tetapi juga lingkungan yang berada di luar lingkungan publik.

Jika kondisi ini terjadi, dapat mengabaikan dampak yang lebih luas dari proses restrukturisasi dan akumulasi teritorial dalam kapitalis gaya baru. Dalam mempelajari politik pariwisata, perlu mengetahui teori politik dan nilai-nilai politik yang mendasari keputusan-keputusan kebijakan publik secara eksplisit dan implisit. Karena dalam menganalisis menghasilkan kekuatan dan kelemahan yang berbeda, maka para peneliti politik pariwisata cenderung mempergunakan pendekatan teoritis untuk menyerang masalah-masalah kebijakan. Dalam penelitian politik pariwisata juga diadopsi pendekatan dialektika, dengan titik tolaknya adalah pandangan-pandangan yang ada pada masyarakat. Kesimpulannya adalah, bukan bukti-bukti formal, melainkan saling pengertian dari masalah-masalah yang dibahas.

Politik pariwisata yang bertujuan menganalisis kebijakan biasanya dimulai dengan premis posibilitas, dengan sudut pandang yang dapat diperdebatkan dan terus berubah, bukannya prinsip-prinsip yang mutlak dan fakta-fakta yang kaku. Analisa kebijakan bukannya menghasilkan bukti-bukti formal tetapi hanya argumentasi yang bersifat meyakinkan. Analisa kebijakan membantu pertimbangan-pertimbangan umum melalui kritik, nasihat dan pendidikan. Analisa kebijakan juga memberikan standar argumentasi dan struktur ilmiah bagi wacana publik. Oleh karena itu, pengetahuan tentang penyusunan kebijakan serta interaksi elemen-elemen dalam lingkungan kebijakan adalah mutlak diketahui jika ada kemauan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan pariwisata, pengembangan pariwisata dan manajemen sumber daya pariwisata.

1.5.2.1 Politik Pariwisata dalam Konteks Pembangunan Daerah

Dalam negara yang menganut sistem kesatuan, terdapat problematika dalam aktualisasi relasi Pusat-Daerah. Hal ini dialami oleh negara berkembang. Persoalan mendasar ialah bagaimana mengurangi kewenangan pemerintah pusat yang terlalu besar, konsentrasi pengambilan keputusan yang berpusat, yang kemudian menyebabkan kinerja birokrasi publik menjadi inefisien dan tidak efektif. Dinamika masalah ini mengerucut pada wacana hingga keputusan politik untuk melakukan desentralisasi.

Pelaksanaan otonomi daerah (otda) diatur melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penerapannya, politik senantiasa mendahulukan pelbagai tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*) ketimbang tujuan personal atau komunal tertentu (*private goals*). Politik juga memperlihatkan aktivitas partai politik sebagai representasi kegiatan individu. Karenanya, ide politik mencakup dimensi seperti: negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan (*policy, beleid*), pembagian (*distribution*), dan alokasi (*allocation*).

Secara historis pula, politik dimaknai sebagai seni mengatur dan mengurus negara serta ilmu kenegaraan dengan cakupan kebijaksanaan, kenegaraan atau pemerintahan. Politik juga merupakan berbagai aktivitas dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan pelbagai tujuan dari sistem itu serta melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Pengambilan keputusan terkait apakah tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara alternatif dan penyusunan skala prioritas dari sejumlah pilihan tujuan tersebut (Budiarjo, 2008).

Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mempromosikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Pemerintah pusat maupun level provinsi bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan sektor ini. Karena kegiatan pariwisata utama terjadi di tingkat lokal, maka pemerintah daerah hendaknya memiliki strategi antisipasi bagi dampak sosio-ekonomi maupun bio-fisik dari sektor ini. Karenanya, perlu dilakukan telaahan pada aspek seperti bagaimana pemerintah daerah dilibatkan dalam pengembangan pariwisata dalam sebuah negara sehingga dapat ditentukan peran presisi bagi peran pemerintah daerah dalam rangka mempromosikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan untuk memberikan solusi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan di daerah pedesaan menimbulkan tantangan yang besar, terutama mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pengakuan dan keterlibatan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Perkembangan pariwisata bergantung pada dua faktor: (a) masyarakat tuan rumah dan populasinya dan (b) wisatawan dan aktivitas.

Lalu lintas turis biasanya menuju area destinasi yang ramah, orang-orang yang tinggal di sekitar lokasi dan tempat acara harus ramah. Untuk alasan inilah, negara yang menjadikan pariwisata daerah menjadi prioritas dalam kebijakan pariwisata nasional. Dalam ekowisata berbasis masyarakat perlu disadari bahwa masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) merupakan jantung pengelolaan pariwisata. Penduduk lokal umumnya menerima pariwisata jika menghasilkan tunjangan sosial budaya dan sosioekonomi serta lingkungan yang dilindungi. Oleh karena itu, keterlibatan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi sangat penting bagi pengembangan pariwisata (Prathama, dkk. 2020).

Pada dasarnya, pariwisata berkelanjutan bukanlah bentuk wisata khusus atau tertentu sehingga semua bentuk pariwisata hendaknya berusaha untuk lebih berkelanjutan pada eksistensi pemangku kepentingan termasuk satu faktor yang menentukan karakteristik tujuan wisata (Aas dan Fletcher, 2005: 28-48) yang meliputi; berbagai level pariwisata (internasional, nasional, regional dan lokal); pengembang pariwisata dan pengusaha, industri pariwisata operator; praktisi bisnis non-pariwisata dan masyarakat luas, termasuk kelompok masyarakat lokal, kelompok masyarakat adat dan penghuni lokal (Simpson, 2001). Strategi pembangunan pariwisata, pembangunan berkelanjutan dapat menjadi satu agenda utama bagi peningkatan pembangunan ekonomi regional.

Pada negara berkembang termasuk Indonesia yang signifikan baru-baru ini muncul sebagai isu utama dalam agenda pembangunan industri pariwisata di banyak negara berkembang. Geliat promosi sektor pariwisata di sejumlah negara berkembang mengingat besarnya potensi yang bisa dikembangkan seperti peningkatan devisa dan pendapatan pemerintah, peningkatan pendapatan masyarakat melalui terciptanya lapangan kerja (Sharpley, 2000). Dalam rangka pengembangan potensi wisata bagi penciptaan lapangan kerja serta nilai kompetitifnya, sejumlah otoritas lokal dan nasional mengadopsi pariwisata berkelanjutan dalam agenda mereka.

Salah satu masalah dalam pesatnya perkembangan industri pariwisata ialah munculnya berbagai dampak yang tidak diinginkan pada sejumlah destinasi wisata seperti lingkungan dan masyarakat, di mana jika tidak diantisipasi, dapat mengancam baik kelayakan ekonomi masyarakat tuan rumah, negara, maupun pembangunan pariwisata itu sendiri (Bramwell et al, 2017). Kurang matangnya strategi perencanaan dapat mengakibatkan kurang efektifnya pengelolaan pengembangan pariwisata (Jamieson dan Noble, 2000).

Ketidakberhasilan pembangunan pariwisata di sejumlah daerah telah melahirkan kesadaran kritis untuk memikirkan ulang secara radikal terhadap konsep pembangunan tradisional terutama dalam hal tujuan dan metode yang ingin dicapai (Harris, 2000). Tantangan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di antaranya terkait prioritas kebijakan ekonomi nasional, struktur administrasi publik, kemunculan isu lingkungan, komersialisasi, dan struktur sistem pariwisata internasional (Tosun, 2001).

Karenanya, sangat penting memahami peran, tanggung jawab dan manfaat dari ketiga pemangku kepentingan yang paling penting bagi tujuan wisata berkelanjutan, yakni: pemerintahan daerah, perusahaan pariwisata dan masyarakat lokal (Brokaj, 2014). Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Suatu perjalanan dapat dibedakan menjadi dua jenis Pertama, perjalanan seseorang fenomenanya tercatat oleh statistik kepariwisataan, seperti di lingkungan imigrasi di mana pada saat orang tersebut melakukan perjalan penerbangan ke negara lain ataupun melakukan perjalanan laut seperti pelabuhan atau bahkan perhotelan menggunakan jasa akomodasi atau destinasi wisata tertentu pada saat orang tersebut membeli tiket. Kedua, perjalanan seseorang fenomenanya tidak tercatat oleh statistik kepariwisataan. Pariwisata dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan pembangunan, memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi masyarakat dalam lingkungan daerah wilayah yang bersangkutan maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar.

Dalam Pariwisata terdapat komponen-komponen kepariwisataan diantaranya Pertama, daya tarik wisata alam. Di mana memiliki daya tarik wisata pada alam yang sangat indah sehingga bisa dikembangkan dengan baik. Kedua, daya tarik budaya, yang dikembangkan berdasarkan hasil karya manusia atau berupa peninggalan budaya pada zaman dahulu. Ketiga, daya tarik wisata minat khusus, daya tarik wisata yang dikembangkan berdasarkan banyaknya pemenuhan keinginan wisatawan secara spesifik, biasanya terkait dengan hobi dan kegemaran wisatawan.

Pariwisata banyak sekali mendapatkan perhatian yang sangat khusus, karena pariwisata juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar dan juga pemerintah. Selain berdampak positif pariwisata juga bisa menimbulkan dampak yang negatif. Utama (2017) menyatakan bahwa diantara dampak positif dari pariwisata yaitu:

1. *Foreight Exchange Earning*

Pengeluaran dari sektor pariwisata memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar kawasan wisata. Selain bisa menggeliatkan perekonomian masyarakat lokal juga bisa memberikan stimulus berinvestasi yang nantinya menyebabkan sektor keuangan bertumbuh seiring dengan bertumbuhnya ekonomi masyarakat sekitar. Banyak negara lain yang penghasilan utamanya dari sektor pariwisata. Dengan banyaknya wisatawan yang datang menyebabkan tumbuhnya bisnis Valuta Asing untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan yang datang ke tempat wisata tersebut.

2. *Contribution To Government Revenues*

Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap pemerintah dapat diuraikan dengan dua cara yakni kontribusi secara langsung dan kontribusi secara tidak langsung. Kontribusi secara langsung bisa berasal dari pajak yang didapatkan pada saat pengunjung datang untuk membeli tiket atau dari retribusi-retribusi yang ada di sekitaran kawasan wisata. Sedangkan kontribusi yang tidak langsung pariwisata terhadap pendapatan pemerintah berasal dari bea cukai barang-barang import dan pajak yang dikenakan kepada pengunjung yang datang ke tempat wisata tersebut.

3. *Employment Generation*

Dengan adanya sektor pariwisata, terbukti bahwa pariwisata secara Internasional berkontribusi nyata terhadap pencapaian peluang kerja, usaha-usaha terkait pariwisata seperti akomodasi, transportasi, restoran, dan usaha seni kerajinan (*souvenir*).

4. *Infrastructure Development*

Terbukti dengan adanya sektor pariwisata mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan infrastruktur yang memadai dan lebih baik. Seperti air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi dan fasilitas pendukung lainnya yang meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga masyarakat setempat.

Dampak negatif dari adanya sektor pariwisata juga salah satu diantaranya ialah adanya kebocoran dalam pembangunan pariwisata yang dikategorikan ada dua jenis kebocoran yaitu kebocoran *import* dan kebocoran *export*. Kebocoran *import* terjadi karena adanya permintaan terhadap makanan dan minuman *import* yang tidak mampu disediakan oleh masyarakat lokal atau dalam negeri. Sedangkan kebocoran *export* terjadi pada pembangunan destinasi wisata khususnya pada negara miskin yang cenderung memerlukan modal dan investasi yang besar untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas wisata lainnya. Dampak negatif lainnya yaitu *Infrastructure Cost* yang mana pembangunan sektor pariwisata menjadi beban pemerintah akan menitikberatkan pada sektor pajak yang mengharuskan masyarakat untuk membayar pajak.

1.5.3 Konflik Dan Konflik Kepentingan

Kata konflik berasal dari Bahasa latin “*confirege*”, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan dan membuat tidak berdaya. Konflik adalah suatu hubungan yang selalu terjadi pada setiap manusia selama dia melakukan hubungan (Sinambela, 2019:458).

Menurut Sopiah (2008), konflik adalah suatu proses yang dimulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau segera mempengaruhi secara negatif pihak lain. Sedangkan menurut Nimran (2009) mengartikan konflik sebagai kondisi yang dipersepsikan ada diantara pihak-pihak atau lebih merasakan adanya ketidaksesuaian antara tujuan dan peluang untuk mencampuri usaha pencapaian tujuan pihak lain. March *and* Simon (1958) mendefinisikan konflik adalah pergulatan antara kebutuhan, ide, keinginan, minat atau orang yang tidak cocok. Konflik muncul ketika apa yang diharapkan individu atau kelompok tidak tercapai.

Ansory dan Indasari (2018:355) konflik adalah hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling ketergantungan dapat pula menyebabkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda dan tidak bekerja sama satu sama lain”. Menurut Kusworo (2019) ada empat macam konflik yaitu:

1. Ditinjau dari tujuannya, apabila ditinjau dari tujuannya konflik dalam suatu organisasi terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Konflik Fungsional (Konstruktif), dapat pula disebut dengan konflik yang konstruktif karena keberadaan konflik ini dengan sengaja dikonstruksikan atau diprogramkan oleh organisasi. Dengan demikian maka konflik tersebut bersifat positif serta mendukung program-program penyempurnaan maupun pengembangan organisasi dan jajarannya.
 - b. Konflik Difungsional, konflik ini cara kerjanya tidak rasional dan banyak didasarkan pada iri hati, sakit hati, emosi dan pemikiran-pemikiran yang bersifat negatif. Oleh karena itu, sudah dapat dipastikan bahwa konflik yang destruktif ini menghambat dan tidak mendukung proses pencapaian tujuan organisasi, bahkan dapat pula menggagalkan tujuan organisasi yang pada akhirnya merugikan semua pihak, baik individu, kelompok yang terlibat konflik maupun organisasi.
2. Ditinjau dari Pelakunya, terbagi menjadi tiga, yaitu:
- a. Konflik Vertikal, konflik yang terjadi dalam suatu organisasi di mana yang terlibat dalam konflik adalah antar tingkatan/hirarki jabatan yang ada dalam suatu organisasi.
 - b. Konflik Horizontal, konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara individu dengan yang memiliki kedudukan/jabatan setingkat, konflik ini juga dapat disebut konflik yang terjadi antara unit, bagian/departemen satu dengan yang lainnya dan memiliki kedudukan setingkat, atau konflik yang terjadi antara pejabat satu dengan pejabat yang lainnya pada tingkat persoalannya sama dalam suatu organisasi.

- c. Konflik Diagonal, adalah konflik yang terjadi dalam suatu organisasi pemerintahan atau organisasi lainnya yang disebabkan karena adanya perlakuan yang tidak adil dalam mengalokasikan sumber-sumber daya organisasi kepada seluruh unit kerja yang ada dalam organisasi. Hal demikian ini dapat mengakibatkan adanya rasa iri hati dan sakit hati dari pihak yang merasa dirugikan yang pada akhirnya bermuara pada munculnya pertentangan.
3. Ditinjau dari Sifatnya, apabila ditinjau dari segi sifatnya konflik terbagi menjadi dua, yaitu:
- a. Konflik secara terbuka, konflik yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat, atau suatu organisasi di mana konflik ini dapat disaksikan oleh mereka (kelompok) yang sedang berkonflik maupun oleh kelompok-kelompok lainnya (termasuk masyarakat umum) baik secara langsung maupun melalui media cetak atau media elektronik.
 - b. Konflik secara tertutup, ini hampir sama dengan konflik terpendam, hanya pada konflik secara tertutup ini masing-masing pihak yang bersebrangan sudah saling menyadari bahwa diantara mereka tidak ada kesalahpahaman, dan mereka meyakini sedang berkonflik. Secara sepintas pihak-pihak diluar yang sedang berkonflik tidak mengetahuinya bahwa dalam organisasi terjadi konflik tertutup. Pada fase ini perang dinginlah yang mereka lakukan dan konflik belum nampak nyata, apabila pimpinan organisasi tidak mengetahui hal ini lambat laun dapat berubah menjadi konflik.

4. Ditinjau dari jangka waktu, konflik juga terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Konflik sesaat, konflik yang terjadi secara spontan konflik terjadi dengan cepat, mendadak tidak direncanakan. Pada umumnya konflik ini terjadi karena adanya kesalahpahaman atau ketersinggungan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal yang demikian segera apabila masing-masing pihak saling menjelaskan dan saling menyadari apa yang menjadi pokok permasalahannya.
- b. Konflik berkelanjutan, ini merupakan kebalikan dari konflik sesaat. Pada konflik berkelanjutan ini biasanya berlangsung lama dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi jika dilakukan penyelesaian.

Menurut Veithzal dan Deddy (2019), secara umum konflik itu terdiri atas tiga komponen, yaitu:

1. *Interest* (kepentingan), yakni sesuatu yang memotivasi orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Motivasi ini tidak hanya dari bagan keinginan pribadi seseorang, tetapi juga peran dan statusnya.
2. *Emotion* (emosi), yang sering diwujudkan melalui perasaan yang menyertai sebagian besar interaksi manusia seperti marah, kebencian, takut, penolakan.
3. *Values* (nilai), yakni komponen konflik yang paling susah dipecahkan karena nilai itu merupakan hal yang tidak bisa diraba dan dinyatakan secara nyata, nilai berada pada kedalam akar pemikiran dan perasaan tentang benar dan salah, baik dan buruk yang mengarahkan dan memelihara perilaku manusia.

1.5.3.1 Pemahaman Tentang Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan dapat didefinisikan sebagai situasi di mana pejabat publik memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang memengaruhi atau terlihat memengaruhi kinerja jabatan publiknya yang seharusnya objektif dan imparial. Dalam definisi ini, seharusnya seorang pejabat tidak bisa dalam mengambil keputusan, melakukan pekerjaannya secara utuh tanpa terbagi atau dipengaruhi kepentingan lainnya.

Pengertian konflik kepentingan tercantum pada Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (14) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penanganan Konflik Kepentingan, yang dimaknai sebagai: "kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya".

Sementara pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2016, makna konflik kepentingan adalah: "Situasi di mana Penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya". Penyelenggara negara dalam hal ini adalah seseorang yang menjabat atau memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi negara dalam wilayah hukum negara dan mempergunakan anggaran yang seluruhnya atau sebagian berasal dari negara.

Baik pejabat negara, pejabat publik, penyelenggara pelayanan publik dan berbagai istilah lainnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk didalamnya semua pejabat yang menyelenggarakan fungsi-fungsi negara baik dalam cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, aparat penegak hukum, organ ekstra struktural (seperti KPK, KPU, Komisi Yudisial, dll).

Tiga belas bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Penyelenggara Negara antara lain:

1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Perangkapan jabatan di lembaga/instansi/perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. Situasi di mana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;

7. Situasi di mana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi di mana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
8. Situasi di mana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan
9. *Post employment* (berupa *trading influence*, rahasia jabatan);
10. Situasi di mana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
11. *Moonlighting* atau *outside employment* (bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya);
12. Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat,
13. Situasi penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Konflik kepentingan adalah suatu keadaan sewaktu seseorang pada posisi yang memerlukan kepercayaan, seperti pengacara, politikus, eksekutif atau direktur suatu perusahaan, memiliki kepentingan profesional dan pribadi yang bersinggungan. Persinggungan kepentingan ini dapat menyulitkan orang tersebut untuk menjalankan tugasnya. Suatu konflik kepentingan dapat timbul bahkan jika hal tersebut tidak menimbulkan tindakan yang tidak etis atau tidak pantas.

Suatu konflik kepentingan dapat mengurangi kepercayaan terhadap seseorang atau suatu profesi. Tercampurnya kepentingan pribadi dan kepentingan publik merupakan akar timbulnya konflik kepentingan. Dampak besar dari praktik konflik kepentingan yaitu penyalahgunaan kekuasaan hingga melupakan tugas utama pejabat publik yaitu untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Ada lima faktor yang menimbulkan terjadinya konflik kepentingan.

1. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian hadiah kepada pejabat publik dengan imbalan untuk memperlancar kepentingan pribadi atau kelompoknya. Hadiah yang diterima oleh pejabat publik tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini mengakibatkan ada kepentingan yang disamarkan ketika menerima hadiah tersebut, dan harus ada timbal balik dari penerimaan hadiah tersebut. Selain itu, pemberian dan penerimaan hadiah dapat mengurangi nilai objektivitas terhadap penilaian profesional kinerja. Apabila menerima hadiah dan memberikan hadiah baik dalam rangkaian dinas atau acara pribadi menjadi kebiasaan yang buruk terhadap budaya kerja. Pengendalian gratifikasi terhadap konflik kepentingan bisa dilakukan dengan cara membuat *declaration of interest*. Selain itu, pejabat negara harus melaporkan hadiah yang diterima kepada KPK, selanjutnya diputuskan tentang status kepemilikannya.

2. Kelemahan Sistem

Kelemahan sistem merupakan permasalahan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan kewenangan yang diakibatkan oleh aturan, struktur, dan budaya organisasi yang ada. Dalam melaksanakan tugas menjadi tidak efisien apabila tata kelola organisasi tidak memiliki sistem yang baik. Sistem yang buruk juga mengakibatkan penyimpangan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pelaksanaan tugas. Mengurangi konflik kepentingan, harus dibuat sistem kelola yang terbuka serta memiliki nilai etika yang tinggi.

3. Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan adalah keadaan seseorang yang memiliki dua jabatan atau lebih, yang mengakibatkan kinerja pejabat tersebut tidak maksimal dan tidak profesional. Hal ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pelayanan publik, disebutkan bahwa pelaksana pelayanan publik dilarang untuk rangkap jabatan. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa PNS dilarang untuk merangkap dua jabatan. Dilihat dari berbagai aspek, seperti etika dan moral, rangkap jabatan tetap dilarang. Rangkap jabatan dengan alasan apapun berujung kepada potensi terjadinya kepentingan konflik, dan membuka peluang terjadinya korupsi.

4. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang merupakan membuat keputusan yang tidak sesuai dengan wewenang dan aturan yang diberikan. Pengendalian yang harus dilakukan yaitu dengan membangun sistem organisasi dengan meningkatkan pengawasan fungsi wewenang di setiap jabatan. Dampaknya keputusan yang dibuat harus akuntabel. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan adalah penyimpangan asas dalam hal administrasi. Seharusnya organisasi dalam memutuskan suatu kebijakan harus tetap sesuai dengan tujuan. Penyalahgunaan wewenang memiliki tiga unsur yaitu: pertama dilakukan dengan sengaja. Kedua, pengalihan dari tujuan yang memiliki wewenang. Ketiga, lahir dari kebiasaan yang buruk serta tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan karena kelalaian.

5. Kepentingan Pribadi

Kepentingan pribadi adalah rasa yang timbul untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dengan cara menggunakan kebijakan yang ada dalam kebutuhan publik. Selain kepentingan pribadi, konflik kepentingan juga bisa tumbuh dari konflik kepribadian dengan orang lain atau rekan kerja. Hal ini muncul karena perbedaan kepribadian, baik dari sikap dan keyakinan. Hal tersebut bisa dikendalikan dengan cara meningkatkan motivasi kerja dengan cara sadar tanggung jawab atas pekerjaan, mengedepankan kejujuran, dan meningkatkan kreativitas.

1.5.4.2 Aktor Dalam Kebijakan

Kajian terhadap aktor kebijakan merupakan hal yang penting. Para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika tahapan-tahapan proses kebijakan. Sesuai dengan pendapat Winarno (2005), jika tipe kebijakan berpengaruh terhadap tingkat kesulitan yang dapat terjadi dalam proses formulasi kebijakan, maka aktor-aktor pelaksana dan hubungan antar aktor berpengaruh langsung terhadap keberhasilan proses formulasi kebijakan. Para aktor tersebut masing-masing mempunyai karakteristik yang memperlihatkan kekuatannya mempengaruhi proses kebijakan. Perumusan kebijakan dalam prakteknya melibatkan berbagai aktor, baik yang berasal dari aktor negara maupun aktor non negara atau yang disebut oleh Anderson (1979) sebagai pembuat kebijakan resmi (*official policymakers*) dan peserta non pemerintahan (*non governmental participants*).

Pembuat kebijakan resmi adalah mereka yang memiliki kewenangan legal untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Mereka ini menurut terdiri atas legislatif; eksekutif; badan administratif; serta pengadilan. Legislatif merujuk kepada anggota kongres/dewan yang seringkali dibantu oleh para stafnya. Adapun eksekutif merujuk kepada Presiden dan jajaran kabinetnya. Sementara itu, badan administratif menurut merujuk kepada lembaga-lembaga pelaksana kebijakan. Di pihak lain menurut, Pengadilan juga merupakan aktor yang memainkan peran besar dalam perumusan kebijakan melalui kewenangan mereka untuk mereviu kebijakan serta penafsiran mereka terhadap undang-undang dasar. Dengan kewenangan ini, keputusan pengadilan bisa mempengaruhi isi dan bentuk dari sebuah kebijakan publik.

Selain pembuat kebijakan resmi, terdapat pula peserta lain yang terlibat dalam proses kebijakan yang meliputi diantaranya kelompok kepentingan; partai politik; organisasi penelitian; media komunikasi; serta individu masyarakat. Mereka ini yang disebut sebagai peserta non pemerintahan (*non governmental participants*) karena penting atau dominannya peran mereka dalam sejumlah situasi kebijakan, tetapi mereka tidak memiliki kewenangan legal untuk membuat kebijakan yang mengikat. Peranan mereka biasanya adalah dalam menyediakan informasi; memberikan tekanan; serta mencoba untuk mempengaruhi. Mereka juga dapat menawarkan proposal kebijakan yang telah mereka siapkan. Jadi meskipun pada akhirnya kebijakan ditentukan oleh institusi yang berwenang, keputusan diambil setelah melalui proses informal negosiasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Keterlibatan aktor lain dalam pemberian ide terhadap proses perumusan kebijakan tetap atau sangat diperlukan. Lembaga/instansi pemerintah banyak terlibat dalam perumusan ataupun pengembangan kebijakan publik. Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa kebijakan sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah mengenai masalah tertentu sehingga keterlibatan lembaga itu sebagai aparat pemerintah dalam ikut menentukan kebijakan menjadi semakin terbuka. Dengan pemahaman tersebut, maka lembaga/instansi pemerintah telah menjadi pelaku penting dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, lembaga/instansi pemerintah juga menjadi sumber utama mengenai usul-usul pembuatan kebijakan dalam sistem politik. Lembaga/instansi tersebut secara khas tidak hanya menyarankan kebijakan, tetapi juga secara aktif melakukan lobi dan menggunakan tekanan-tekanan dalam penetapan kebijakan publik.

Aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi pun memiliki peran yang berbeda dengan evaluasi rancangan kebijakan. Aktor-aktor dalam formulasi adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan kebijakan yang dibuat dan berasal dari berbagai kalangan. Dalam formulasi paling tidak, stakeholders bisa berasal dari legislatif, eksekutif maupun kelompok kepentingan. Ketiganya berada dalam kepentingan yang sama dalam pengambilan keputusan sedangkan dalam evaluasi rancangan kebijakan, aktor-aktor yang terlibat dalam eksekutif tetapi berasal dari tingkat pemerintahan yang berbeda.

Hubungan antar aktor ini bisa bersifat horizontal (*layers*), vertikal (*levels*), maupun antar lembaga (*locus-loci*). Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin banyak aktor (*layers, levels, loci*) yang terlibat dalam formulasi sebuah kebijakan, maka semakin sulit pula kebijakan tersebut diimplementasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini mudah dipahami karena semakin banyak aktor yang terlibat, maka semakin banyak pula biaya koordinasi yang dibutuhkan, semakin banyak pula kepentingan yang bersaing untuk didahulukan, belum lagi masalah kewenangan dan tanggung jawab antar aktor yang mesti diperjelas terlebih dahulu.

Secara umum aktor-aktor atau yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan dibagi dalam dua kategori besar yakni (Jones, 2007):

1. Aktor *Inside Government*, pada umumnya meliputi: a) Eksekutif (Presiden; Staf Penasihat Presiden; para Menteri, para Kepala Daerah) yang umumnya merupakan jabatan politis; b) Anggota-anggota dari badan perwakilan rakyat (Lembaga Legislatif); c) Badan dan orang-orang Yudikatif secara parsial; dan d) Birokrasi.
2. Aktor *Outside Government*, pada umumnya meliputi: a) Kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) yang bisa berwujud LSM (NGO). Kelompok/ikatan profesional, kelompok bisnis, perserikatan buruh, bahkan organisasi atau lembaga keagamaan; b) Akademisi, peneliti dan konsultan, pihak swasta (perusahaan) memberikan layanan sesuai permintaan pemerintah); c) Politisi; d) Media massa; e) Opini publik; f). Kelompok sasaran kebijakan (*beneficiaries*); g) Lembaga-lembaga donor.

Orang-orang yang terlibat dalam formulasi kebijakan publik tersebut sebagai aktor formulasi kebijakan publik. Sebutan lain bagi aktor adalah partisipan, peserta perumusan kebijakan publik. Oleh karena kebijakan publik mempunyai tingkatan-tingkatan (nasional, umum, khusus, dan teknis), maka para aktor formulasi kebijakan di setiap tingkat dan tingkatan tersebut berbeda. Tentunya kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, salah satu alternatif yang dilakukan adalah kemauan pemerintah untuk membangun jaringan dengan aktor di luar pemerintah, yaitu aktor privat dan aktor *civil society*. Pemerintah sudah tidak tepat lagi memandang aktor-aktor tidak resmi sebagai "lawan politik" tetapi sudah saatnya pemerintah menjadikan aktor-aktor itu sebagai "sahabat" dalam membicarakan produk-produk kebijakan publik di daerah.

1.5.4 Konsep Desa Wisata

Desa wisata adalah desa yang dijadikan tempat wisata karena daya tarik yang dimilikinya. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung. Desa wisata disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata biasanya memenuhi semua unsur wisata yang memiliki potensi daya tarik, seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia. Desa wisata biasanya dibuat di satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya. Desa Wisata secara keseluruhan mengintegrasikan semua unsur tersebut di suatu desa, untuk mengangkat keunikan dan kearifan lokal setempat.

Inskeep (1991) mendefinisikan Desa Wisata ini sebagai wisata pedesaan di mana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat. Terdapat dua komponen utama Desa Wisata:

1. Akomodasi: sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
2. Atraksi: seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang berintegrasi pada wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti: kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik.

Menurut pola, proses dan tipe pengelolanya, Desa Wisata di Indonesia dibagi dalam dua bentuk yaitu tipe terstruktur dan tipe terbuka. Tipe terstruktur ditandai dengan karakter-karakter, sebagai berikut:

1. Lahan terbatas yang dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik untuk kawasan tersebut. Tipe ini mempunyai kelebihan dalam citra yang ditumbuhkannya sehingga mampu menembus pasar internasional.
2. Lokasi pada umumnya terpisah dari masyarakat atau penduduk lokal, sehingga dampak negatif yang ditimbulkannya diharapkan terkontrol. Selain itu pencemaran sosial budaya yang ditimbulkan akan terdeteksi sejak dini.
3. Lahan tidak terlalu besar dan masih dalam tingkat kemampuan perencanaan yang integratif dan terkoordinasi, sehingga diharapkan akan tampil menjadi semacam agen untuk mendapatkan dana-dana.

Pemerintah Indonesia mengharapkan tempat di Indonesia yang tepat dapat dirancang dengan konsep yang serupa, sebagai berikut:

a. Tipe Terbuka (*spontaneus*)

Tipe ini ditandai dengan karakter-karakter yaitu tumbuh menyatunya kawasan dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola dengan masyarakat lokal. Distribusi pendapatan yang didapat dari wisatawan dapat langsung dinikmati oleh penduduk lokal, akan tetapi dampak negatifnya cepat menjalar menjadi satu ke dalam penduduk lokal, sehingga sulit dikendalikan. Terdapat tiga prinsip dasar dalam mengembangkan Desa Wisata, yakni:

1. Pengembangan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala kecil beserta pelayanan di dalam atau dekat dengan desa.
2. Fasilitas-fasilitas dan pelayanan tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh penduduk desa, salah satu bisa bekerja sama atau individu yang memiliki.
3. Pengembangan Desa Wisata didasarkan pada salah satu "sifat" budaya tradisional yang lekat pada suatu desa atau "sifat" atraksi yang dekat dengan alam dengan pengembangan desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut.

Pengembangan Desa Wisata harus direncanakan secara hati-hati supaya berdampak yang timbul dapat dikontrol. Berdasar penelitian dari UNDP/WTO bersama konsultan Indonesia, dicapai dua pendekatan dalam menyusun rangka kerja/konsep kerja dari pengembangan sebuah desa menjadi Desa Wisata, yakni pendekatan pasar dan pendekatan fisik.

b. Kriteria Desa Wisata dalam Pendekatan Pasar pada pendekatan ini diperlukan lima kriteria, yaitu:

1. Atraksi wisata; yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif.
2. Jarak Tempuh; jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari provinsi dan jarak dari kabupaten.
3. Besaran Desa; menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan desa.
4. Sistem Kepercayaan dan kemasyarakatan; merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa. Perlu dipertimbangkan mayoritas masyarakat yang ada.
5. Ketersediaan infrastruktur; meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya.

Masing-masing kriteria digunakan untuk melihat karakteristik utama suatu desa untuk kemudian menentukan apakah suatu desa akan menjadi desa dengan tipe berhenti sejenak, tipe *one day trip* atau tipe tinggal inap.

c. Tiga bentuk interaksi

1. Interaksi tidak langsung. Model pengembangan didekati dengan cara bahwa desa mendapat manfaat tanpa interaksi langsung dengan wisatawan. Bentuk kegiatan yang terjadi semisal: penulisan buku-buku tentang desa yang berkembang, kehidupan desa, seni dan budaya lokal, arsitektur tradisional, latar belakang sejarah, pembuatan kartu pos dan sebagainya.

2. Interaksi setengah langsung. Bentuk-bentuk *one day trip* yang dilakukan oleh wisatawan, kegiatan-kegiatan meliputi makan dan berkegiatan bersama penduduk dan kemudian wisatawan dapat kembali ke tempat akomodasinya. Prinsip model tipe ini adalah bahwa wisatawan hanya singgah dan tidak tinggal bersama dengan penduduk.
3. Interaksi Langsung. Wisatawan tinggal/bermalam dalam akomodasi yang dimiliki oleh desa tersebut. Dampak yang terjadi dapat dikontrol dengan berbagai pertimbangan yaitu daya dukung dan potensi masyarakat setempat.

Pendekatan Fisik Pengembangan Desa Wisata, pendekatan ini merupakan solusi yang umum dalam mengembangkan sebuah desa melalui sektor pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus dalam mengontrol perkembangan dan menerapkan aktivitas konservasi.

1. Mengonservasi sejumlah rumah yang memiliki nilai budaya dan arsitektur yang tinggi dan mengubah fungsi rumah tinggal menjadi sebuah museum desa untuk menghasilkan biaya untuk perawatan dari rumah tersebut. Contoh pendekatan dari tipe pengembangan model ini adalah Desa Wisata di Koanara, Flores. Desa wisata yang terletak di daerah wisata Gunung Kelimutu ini mempunyai aset wisata budaya berupa rumah-rumah tinggal yang memiliki arsitektur yang khas. Dalam rangka mengkonservasi dan mempertahankan rumah-rumah tersebut. Untuk mewadahi kegiatan wisata di daerah tersebut dibangun juga sarana wisata untuk wisatawan yang akan mendaki Gunung Kelimutu dengan fasilitas berstandar resor minimum dan kegiatan budaya lain.

2. Mengonservasi keseluruhan desa dan menyediakan lahan baru untuk menampung perkembangan penduduk desa tersebut dan sekaligus mengembangkan lahan tersebut sebagai area pariwisata dengan fasilitas-fasilitas wisata. Contoh pendekatan pengembangan Desa Wisata jenis ini adalah Desa Wisata Sade, di Lombok.
3. Mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi di dalam wilayah desa tersebut yang dioperasikan oleh penduduk desa tersebut sebagai industri skala kecil. Contoh dari bentuk pengembangan ini adalah Desa wisata Wolotopo di Flores. Aset wisata di daerah ini sangat beragam antara lain: kerajinan tenun ikat, tarian adat, rumah-rumah tradisional, dan pemandangan ke arah laut. Wisata di daerah ini dikembangkan dengan membangun sebuah perkampungan. Fasilitas-fasilitas wisata ini dikelola sendiri oleh penduduk desa setempat. Fasilitas wisata berupa akomodasi bagi wisatawan, restoran, kolam renang, peragaan tenun ikat, plaza, kebun dan dermaga perahu boat.

Desa Wisata menempatkan komunitas atau masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan, kemudian memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam aktivitas sosialnya, kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan; mewadahi peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di wilayahnya; meningkatkan nilai kepariwisataan serta memberdayakannya bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai pelaku utama, komunitas atau masyarakat berupaya meningkatkan potensi pariwisata atau daya tarik wisata yang ada di wilayahnya. Selanjutnya, komunitas atau masyarakat menyiapkan diri sebagai tuan rumah yang baik bagi para wisatawan ketika berkunjung. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komunitas atau masyarakat di Desa Wisata, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mendayagunakan aset dan potensi yang dimiliki.

1.6 Penelitian Terdahulu

Pada saat melakukan proses penyusunan penelitian, tentunya penelitian ini memiliki acuan penelitian yang berasal dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yang dijadikan sebagai referensi dan pembanding penelitian ini, dari *fenomena gap* dan *research gap* pada penelitian terdahulu, sebagai berikut:

1. Pindul (2019). Makalah ini membahas tentang wacana dan relasi kuasa antara BUMDes Maju Mandiri dan pengelola objek wisata Goa Pindul. Dengan menggunakan analisis wacana Foucauldian, penelitian ini mengidentifikasi konsep pembangunan dan hubungan antar agen untuk memahami intertekstualitas dan penyelarasan wacana antara kedua belah pihak. Penelitian ini mengungkapkan konflik yang sedang berlangsung karena perbedaan nilai, konsep, dan sikap dalam mengelola objek wisata. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan hubungan kekuasaan antara kedua entitas. Forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat desa melibatkan BPD, pemerintah desa, dan masyarakat desa

untuk membahas hal-hal strategis dalam tata kelola. BUMDes memiliki izin untuk pengelolaan lingkungan dan pariwisata. Analisis wacana mengindikasikan adanya dominasi wacana pemberdayaan dalam pengelolaan objek wisata Goa Pindul. Implikasi praktis antara lain perlunya menata ulang konsep pengelolaan pariwisata, menggunakan pendekatan budaya dalam komunikasi, peran mediator pemerintah desa, dan integrasi seluruh elemen masyarakat untuk keberlanjutan pariwisata.

2. Abisono, Dkk. (2020). Makalah ini membahas konsep kewarganegaraan dalam menganalisis "*the commons*" dan mengusulkan model tata kelola yang bergeser dari pola afirmasi ke pola transformasi. Model ini melibatkan pemosisian desa sebagai "negara kecil", mengubah relasi kuasa dengan menempatkan kewenangan pengelolaan sumber daya bersama di tangan pemerintah desa, dan mendistribusikan manfaat dan kesejahteraan melalui desain pengembangan pariwisata desa dengan sistem zonasi. Penelitian ini juga berterima kasih atas dukungan Kementerian Riset dan Teknologi untuk penelitian ini. Penelitian ini mengkaji kewarganegaraan sebagai cara untuk mengatasi konflik dalam mengelola sumber daya bersama di Desa Bleberan, Gunungkidul. Penelitian ini menemukan bahwa konflik dalam mengelola sumber daya bersama di Desa Bleberan berasal dari pembentukan kewarganegaraan yang diperebutkan tanpa kapasitas negosiasi yang memadai. Makalah ini menyimpulkan bahwa penelusuran terhadap pembentukan kewarganegaraan sangat penting untuk menemukan solusi terhadap konflik dalam mengelola sumber daya bersama.

3. Ariyani, Dkk. (2020). Artikel-artikel dalam daftar pustaka ini berfokus pada kolaborasi pemangku kepentingan dan tata kelola dalam pengembangan pariwisata di wilayah Kedung Ombo. Artikel-artikel tersebut menekankan pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan untuk mengatasi tantangan dan mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan. Studi ini menggunakan teknik analisis pemangku kepentingan dengan menggunakan perangkat lunak yaitu *Mactor* untuk mengidentifikasi para aktor, peran mereka, tujuan strategis, dan potensi konflik dalam pengembangan pariwisata di Kedung Ombo. Kebutuhan akan model tata kelola kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan disoroti untuk mengelola potensi pariwisata secara efektif.
4. Lubis dkk. (2020). Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. Salah satu alternatif pembangunan saat ini adalah Pengembangan Pariwisata, terutama pariwisata perdesaan. Permasalahan mendasarnya adalah bagaimana strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Pengembangan Desa Wisata dapat mempertimbangkan potensi lokal, pemerintah, swasta, sektor ekonomi formal dan informal serta kelompok kepentingan internal dan eksternal. Seperti pariwisata di pedesaan Cina yang mengubah identitas lokal setelah pengembangan pariwisata "Identitas pedesaan menjadi kurang 'pedesaan'. Ditemukan bahwa pembangunan pedesaan di Cina berdampak pada hilangnya nilai-nilai lokalitas yang meliputi norma-norma, pengetahuan lokal dan yang paling penting adalah keterampilan

pertanian. Dalam studi mereka menilai bahwa gangguan dari wisatawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap pembangunan pariwisata. Namun, optimisme pembangunan tetap harus ditanamkan dalam mengembangkan pariwisata pedesaan dengan strategi yang tepat.

5. Saputra dan Ali (2020). Penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan pariwisata dan pengelolaan destinasi di Kabupaten Samosir, khususnya di sekitar Danau Toba. Penelitian ini membahas pentingnya kebijakan pariwisata dalam mengembangkan sektor pariwisata untuk pembangunan secara keseluruhan. Pemerintah menekankan pengembangan pariwisata sebagai sektor utama dalam pembangunan nasional, dengan kebijakan dan strategi khusus yang diuraikan untuk Kabupaten Samosir. Tantangan dalam implementasi kebijakan dan manajemen pariwisata disoroti, dengan rekomendasi untuk meningkatkan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, dan sistem informasi di lokasi-lokasi wisata. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat lokal dianggap penting untuk keberhasilan pengembangan destinasi pariwisata.
6. Wibisono Dkk. (2020). Penelitian ini membahas tentang model pengembangan destinasi wisata pedesaan dengan studi kasus di Desa Wisata Gambung Mekarsari. Desa ini memiliki potensi alam yang belum dimanfaatkan, dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data dari Diskusi Kelompok Terarah dan wawancara mendalam. Model pengembangannya menggunakan pendekatan Quintuple Helix, yang menggabungkan lima elemen berbeda untuk memperkuat

pengembangan pariwisata berkelanjutan. Jurnal yang relevan di bidang pariwisata antara lain "Desain Desa Pintar", "Strategi Pemasaran Pariwisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah", dan "Konsep Pengembangan Desa Wisata di Desa Bandungan, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan"

7. Kurniati, Dkk. (2021). Artikel-artikel tersebut membahas manajemen konflik dalam pengembangan pariwisata di Desa Curug Cikuluwung, dengan fokus pada konflik yang terjadi di antara berbagai pihak seperti BUMDes, warga, organisasi masyarakat, dan pemerintah desa. Konflik-konflik tersebut muncul dari isu-isu yang berkaitan dengan akses, kepentingan ekonomi, politik, dan tantangan komunikasi. Pentingnya pengelolaan konflik berbasis masyarakat, mediasi, dan pemahaman para pihak yang terlibat dalam konflik disoroti sebagai hal yang krusial untuk menyelesaikan masalah dan melanjutkan pengembangan pariwisata desa secara berkelanjutan.
8. Simatupang dan Sukmadi (2021). Analisa Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Bandung selama Pandemi Covid 19. Kota Bandung sebagai salah satu daerah yang memiliki kasus infeksi Covid 19 terbanyak di Provinsi Jawa Barat menerapkan berbagai kebijakan dalam upayanya menanggulangi penyebaran Covid 19 tidak meluas dan menginfeksi banyak masyarakat. Salah satu kebijakan yang berdampak langsung kepada sektor pariwisata yaitu adanya surat edaran Walikota Bandung Tertanggal 31 Maret 2020 Tentang Himbauan untuk Sementara Tidak Melaksanakan Kegiatan Operasional Jasa Usaha

Pariwisata dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan Covid 19. Pemberhentian kegiatan operasional jasa wisata berdampak langsung kepada industri pariwisata di Kota Bandung.

9. Pamularsi (2021). Makalah ini membahas tentang strategi pengembangan potensi wisata alam di Desa Abangsongan, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Desa ini memiliki potensi wisata yang belum dimanfaatkan seperti danau, hutan, dan Gunung Abang. Melalui analisis SWOT, strategi pengembangan yang direkomendasikan meliputi promosi, pembangunan fasilitas, pelatihan pelestarian lingkungan, kolaborasi dengan investor, pemberdayaan masyarakat, dan pelatihan kepariwisataan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer dalam penelitian pengembangan wisata alam di Desa Abangsongan.
10. Rahu, (2021). Makalah ini membahas model kolaborasi Pentahelix dalam pengembangan Desa Wisata Sei Gohong di Palangka Raya. Studi ini menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif, pertemuan rutin, dan pembentukan peraturan untuk meningkatkan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan termasuk akademisi, sektor swasta, komunitas, pemerintah, dan media. Studi ini mengungkapkan bahwa kolaborasi tersebut belum optimal karena adanya isu-isu seperti kurangnya kesadaran kolektif, kesenjangan komunikasi, dan tantangan dalam pendanaan dan manajemen. Diperlukan perhatian dan upaya khusus

untuk meningkatkan kolaborasi demi pengembangan Desa Wisata Sei Gohong yang optimal.

11. Fadlurrahman, dkk. (2022) Makalah ini membahas tentang tata kelola kolaboratif dalam pengembangan pariwisata di Desa Ngargogondo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Desa ini memiliki potensi pariwisata yang belum dimanfaatkan, tetapi struktur jaringan pemangku kepentingan kurang terkoordinasi, sehingga menimbulkan potensi konflik dalam pengembangan pariwisata. Rekomendasi yang diberikan meliputi konsultasi pemangku kepentingan untuk pembagian tugas dan penggunaan lahan dalam usaha pariwisata, serta pembentukan forum komunikasi yang terfokus untuk pengembangan pariwisata desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses tata kelola kolaboratif dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata di Desa Ngargogondo.
12. Prasiasa, (2022). Dokumen-dokumen tersebut mengeksplorasi persinggungan antara pariwisata dan politik, menekankan hubungan antara kedua bidang tersebut dan bagaimana pariwisata dapat berdampak pada struktur kekuasaan dan nilai-nilai di destinasi wisata. Dokumen-dokumen tersebut membahas topik-topik seperti politik pariwisata di Asia, wacana periklanan dalam pemasaran, literatur taman nasional, dan pengembangan kawasan pariwisata dalam kerangka pariwisata politik. Pentingnya memahami politik dalam kegiatan pariwisata disoroti, dengan fokus pada peran pemerintah dan kapitalis dalam pengembangan

pariwisata dan perlunya penelitian akademis untuk mengatasi dominasi pemerintah dalam kebijakan pariwisata.

13. Bidi, dkk. (2023). Makalah ini membahas strategi pengembangan Desa Wisata untuk mengoptimalkan potensi pariwisata, dengan menekankan pentingnya hubungan kekuasaan dalam prosesnya. Studi yang dilakukan di Desa Wisata Detusoko Barat, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, menyoroti keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan yang berbeda dalam interaksi kekuasaan selama pengembangan Desa Wisata. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya kebijakan politik dalam pengembangan pariwisata dan dampak positifnya terhadap pendapatan daerah. Dokumen ini menekankan peran lembaga-lembaga desa, seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dalam mengembangkan sumber daya alam dan budaya di Desa Detusoko Barat.
14. Hamida, (2023). Makalah ini membahas konsep Six Hats Thinking, sebuah strategi berpikir yang melibatkan penggunaan enam topi yang berbeda untuk menganalisis masalah dari berbagai perspektif. Dalam konteks pengembangan Desa Tambaksari menjadi Desa Wisata, para peserta menggunakan topi dengan warna yang berbeda yang mewakili fakta, dampak positif, dampak negatif, emosi, kreativitas, dan kesimpulan. Melalui pendekatan ini, peserta dapat secara aktif dan efektif mengevaluasi dan memecahkan masalah. Analisis potensi Desa Tambaksari dan upaya pengembangannya dilakukan melalui survei langsung, FGD dengan metode Six Thinking Hats, dan data sekunder.

Berdasarkan analisis SWOT, strategi yang dipilih adalah W-O, dan pembentukan Kelompok Sadar Wisata.

15. Helmy, (2024). Penelitian ini membahas tentang konflik kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan wisata religi di Desa Bogoran, di mana terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah desa. Konflik muncul karena kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah desa yang kurang merespon keinginan mereka. Konflik tersebut akhirnya diselesaikan secara musyawarah, dan pembangunan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat tanpa melibatkan pemerintah desa. Tujuan utama masyarakat adalah untuk meningkatkan perekonomian dan melestarikan makam leluhur.

Tabel 1.1
Mapping Penelitian Sebelumnya, Perbedaan dan persamaan dengan Penelitian ini

Nomor	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan dengan Penelitian Ini
1.	Pindul (2019) Wacana Dan Relasi Kuasa Dalam Pengelolaan Objek Wisata Goa Pindul	Mengisi celah kajian mengenai relasi kuasa di sektor pariwisata yang masih belum banyak mendapatkan perhatian dari para peneliti di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah pengetahuan tentang dinamika pembangunan pariwisata pedesaan di Indonesia, khususnya Kabupaten Gunungkidul	Penelitian ini menggunakan analisis wacana Foucauldian yang tidak hanya berfokus pada bahasa dan teks tetapi juga tindakan eksplisit yang mewujud dalam semua aspek pembangunan destinasi wisata. Metode lain yang digunakan adalah wawancara dan analisis dokumen serta observasi langsung	PNPM Mandiri dinilai gagal karena sekitar 7.500 desa penerima dana PNPM Mandiri belum berhasil lepas dari kemiskinan. Kegagalan disebabkan oleh buruknya kinerja fasilitator dan kesalahan stakeholders dalam memahami tujuan program	Perbedaannya dalam penelitian ini konteksnya tidak meneliti tentang PNPM Persamaannya penelitian pada fokus untuk pariwisata pedesaan

Nomor	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan dengan Penelitian Ini
2.	Abisono, Dkk. (2020) The Commons Dalam Perspektif Keargaan: Studi Konflik Pengelolaan Wisata Alam Desa blebaran Gunung Kidul	Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji daya jangkau perspektif kewargaan dalam memetakan persoalan pengelolaan "the commons" dengan merekonstruksi formasi kewargaan yang eksis	Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan strategi studi kasus instrumental. Studi diawali dengan pengumpulan data selama 3 bulan menggunakan teknik wawancara, FGD, observasi, dan dokumentasi. Data kemudian diolah dan dianalisis hingga menarik simpulan yang solid dengan uji keabsahan data	Hasil kajian menemukan konflik pengelolaan the commons di Blebaran berakar dari formasi kewargaan yang kontestatatif namun tanpa diimbangi kapasitas negosiasi secara memadai. dengan kewargaan liberal yang cacat memunculkan eksklusif, ketidaksetaraan, dan pemusatan kesejahteraan. Sementara itu model republikan belum mampu tampil mengimbangi dominasi keduanya. Lemahnya kapasitas negosiasi atas keanggotaan, hak, dan beban tentang bagaimana the commons seharusnya dikelola berimplikasi pada kontestasi yang tidak terkelola.	Perbedaannya penelitian ini tidak meneliti tentang wisata alam tetapi wisata alam di Desa Wisata Persamaannya pada penelitian ini memfokuskan pada konflik pengelolaan wisata

Nomor	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan dengan Penelitian Ini
3.	Ariyani, Dkk. (2020) Model hubungan aktor pemangku kepentingan dalam pengembangan potensi pariwisata Kedung Ombo	Mengidentifikasi aktor pemangku kepentingan di kawasan Kedung Ombo. Mendeskripsikan kekuatan dan sikap aktor terhadap tujuan pengembangan destinasi wisata Kedung Ombo. Mendeskripsikan pola keterhubungan antar aktor dengan tujuan pengembangan	Paradigma penelitian kualitatif-kuantitatif (mixed method). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, diskusi kelompok fokus, dan lokakarya	Penelitian ini belum menggambarkan model pengembangan potensi wisata Kedung Ombo secara utuh. Penelitian selanjutnya perlu menganalisis peta dukungan yang harus diberikan oleh masing-masing aktor	Perbedaannya penelitian ini tidak membahas mix method kualitatif dan kuantitatif Persamaannya penelitian ini membahas aktor pemangku kepentingan dan potensi pariwisata
4.	Lubis et al. (2020). Strategy of Tourism Village Development Based on Local Wisdom.	<i>This study seeks to reveal the right strategy in developing tourism in the village of Telaga Biru Bangkalan based on local resources.</i>	<i>The data is in the form of interpretations of research results published in national and international journals that are analyzed</i>	<i>The Strategy for the Implementation of Batik Tourism Village program through stages, including First, increasing community capacity with knowledge as the main target of Knowledge,</i>	Perbedaannya adalah penelitian ini tidak membahas strategi dari pariwisata di daerah secara lebih fokus, namun demikian penelitian ini lebih banyak membahas kebijakan

Nomor	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan dengan Penelitian Ini
		<p><i>This study uses a literature review with a tourism development approach within a qualitative method frame.</i></p>	<p><i>descriptively to produce conclusions. The result of this study is the formulation of a form of tourism in a tour package that includes batik schools, traditional Madurese games, and traditional art performances, regional culinary specialties, and lodging with the Tanean Lanjhang concept.</i></p>	<p><i>Attitudes, and Practices (KAP) of the local community through education and training activities (CBT). Second, human resource inventories for local guides, Batik school instructors, traditional Madurese game teams, Madurese culinary providers. Third, the institutionalization of tourism village management at the village level will be responsible for the sustainability of the tourism village. Fourth, the efforts of bridging and linking with the Bangkalan tourism office and investors. Fifth, cooperation with the travel agencies in Madura.</i></p>	<p>yang didalamnya menjadi rekomendasi setelah mengkaji kebijakan terkait dengan strategi kedepan dalam pengembangan Desa Wisata. Persamaannya adalah fokus pada pengembangan Desa Wisata</p>

Nomor	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan Penelitian Ini
5.	Saputra dan Ali. (2020) Analisis Kebijakan Pariwisata Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap konteks fenomena secara keseluruhan	Metodologi: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang merupakan jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Pemerintah Kabupaten Samosir mempunyai visi dan misi yang dipertimbangkan dari kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis. Visi Kabupaten Samosir Tahun 2016 – 2021 adalah terwujudnya Masyarakat Samosir yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing Berbasis Pariwisata dan Pertanian. Misi pembangunan Kabupaten Samosir untuk lima tahun ke depan mencakup membangun sistem pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) yang berorientasi pada pelayanan publik.	Perbedaannya adalah penelitian ini memberikan cakupan lebih luas terkait evaluasi kebijakan pariwisata. Persamaannya adalah fokus pada wisata dan deskriptif dengan pendekatan kualitatif

Nomor	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan dengan Penelitian Ini
6.	Wibisono, Dkk, 2020. Model Pengembangan Destinasi Pariwisata Pedesaan Studi Kasus: Desa Wisata Gambung Mekarsari	Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi yang ada di kawasan Desa Wisata serta menemukan dan mengembangkan model pengembangan Desa Wisata yang paling cocok untuk daerah alam Gambung Mekarsari	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui dua cara, yaitu Focus Group Discussion (FGD) dan in-depth interview. Teknik analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif, analisa skoring berdasarkan analisis potensi-permasalahan menggunakan SWOT, dan analisis triangulas	Model dengan pendekatan Quintuple Helix memberikan implikasi ke lingkungan dengan melibatkan lima elemen yang berbeda; akademia, industri ekonomi yang terkait, pemerintah, media, dan masyarakat di lingkungan Desa Wisata untuk memperkuat pengembangan pariwisata secara sustainable	Perbedaannya penelitian ini tidak hanya mengembangkan satu destinasi di satu desa melainkan dua belas desa Persamaannya penelitian ini tentang pengembangan Desa Wisata dengan teknik analisis yang sama karena menggunakan kualitatif
7.	Kurniati Dkk. (2021) Manajemen Konflik dalam	Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana konflik yang terjadi dalam	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data	Hasil penelitian ini memperlihatkan terdapat dua peristiwa konflik pada pengembangan wisata Desa Cibitung Wetan,	Perbedaannya penelitian ini tidak membahas manajemen konfliknya tetapi deskripsi konflik kepentingan

Nomor	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan dengan Penelitian Ini
	Pengembangan Wisata Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.	pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung yang meliputi, urutan kejadian konflik, aktor isu-isu konflik, aktor yang terlibat dalam konflik, tahapan konflik, dan akibat konflik serta merumuskan strategi manajemen konflik di komunitas wisata desa Curug Cikuluwung yang diharapkan bisa berkontribusi dalam pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung pada khususnya, umumnya untuk pengembangan wisata desa di Desa Cibitung Wetan	dikumpulkan melalui pengumpulan dokumen, pengamatan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok. Analisis data dilakukan secara deskriptif sesuai dengan aspek yang dikaji	yakni konflik antara BUMDes dengan warga dari desa tetangga (Desa Pamijahan) dan konflik antara pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung dengan pemerintah Desa Cibitung Wetan. Konflik pertama sudah ada solusinya, namun konflik kedua belum ada solusinya. Upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik sudah dilakukan oleh komunitas berupa manajemen konflik berbasis komunitas (Community-Based Conflict Management), namun belum menjadi solusi. Perlu ada mediasi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas wisata desa untuk memfasilitasi .	Persamaannya penelitian ini adalah fokus konflik, dan pengembangan Desa Wisata

Nomor	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan Penelitian Ini
8.	Simatupang dan Sukmadi. (2021) Analisa Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Bandung selama Pandemi Covid 19.	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Bandung selama pandemi covid 19.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Data sebagai sumber dasar analisis dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi (<i>documentary study</i>). Data ini kemudian akan diolah melalui tiga tahapan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data/ <i>display</i> dan penarikan kesimpulan.	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 tengah memasuki era normal baru. Pariwisata berkelanjutan akan menjadi sebuah konsekuensi dari bagian pengembangan pariwisata, setelah pandemi Covid-19 selesai. Kerja pariwisata berkelanjutan bukan hanya kerja sektoral, tapi harus menyeluruh baik masyarakat, pemerintah, akademisi dan lainnya, atau yang biasa disebut pentahelix.	Perbedaannya adalah penelitian ini memasukkan evaluasi pengembangan sebagai strategi tidak hanya selama Covid tetapi kebijaka yang berlanjutan sampai sesudah Covid. Persamaannya, penelitian ini memfokuskan pada pariwisata kerjasama yang besar antar pihak terkait

Nomor	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan dengan Penelitian Ini
9.	Pamularsih (2021) Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam di Desa Abangsongan, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali	Formulasi strategis memiliki tujuan untuk menyusun strategi yang relevan dengan visi misi organisasi dan DTW. Formulasi strategi harus dilakukan supaya mampu menyelesaikan masalah yang ada saat ini maupun yang akan terjadi pada masa mendatang	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana permasalahan yang dibahas bersifat sementara dan akan berubah serta berkembang. Metode ini tidak berkaitan dengan angka melainkan mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan data yang didapat selama di lapangan. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian serta berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengambilan data dilakukan	Desa Abangsongan di Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, memiliki potensi wisata alam yang belum dikembangkan secara optimal, termasuk danau, hutan, dan Gunung Abang. Melalui analisis SWOT	Perbedaannya adalah penelitian ini meneliti juga evaluasi kebijakan pariwisata tidak hanya sebatas potensi wisatanya Persamaannya penelitian ini fokus pada pengembangan potensi wisata dan metodologi

Nomor	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan dengan Penelitian Ini
10.	Rahu (2021) Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukut Batu Kota Palangka Raya	Melihat bagaimana Kolaborasi Model Pentahelix dalam pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode focus group, wawancara mendalam, dan observasi berperan serta. Data dikumpulkan melalui dokumen, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi visual seperti foto dan video	Berdasarkan hasil penelitian, Kolaborasi Model Pentahelix dalam pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya masih belum optimal	Perbedaannya penelitian ini peneliti lebih pada arah kebijakan untuk kolaborasi Persamaannya penelitian ini sama penelitian kualitatif dan fokus paa pengembangan Desa Wisata
11.	Fadlurrahman, dkk. (2022) <i>Collaborative governance</i> dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di desa	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses <i>collaborative governance</i> beserta hambatan yang menyertainya dalam pengembangan pariwisata di Desa Ngargogondo	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan di Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Informan	Hasil penelitian menemukan bahwa para pelaku wisata di Desa Ngargogondo telah belajar dari desa-desa lainnya di Kecamatan Borobudur yang memiliki jumlah kunjungan wisatawan yang tinggi. Komitmen untuk mengejar ketertinggalan ini terwujud	Perbedaannya penelitian ini pada penelilian ini tidak membahas lebih detail tetang <i>collaborative</i> beserta hambatannya Persamaannya penelitian ini sama sama fokus paa pengembangan Desa Wisata

Nomor	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan persamaan Penelitian Ini	dan dengan
	Ngargoogondo Kecamatan Borobudur		<p>dipilih secara purposive meliputi perangkat desa, pokdarwis, pelaku wisata, pelaku usaha potensial, dan pemerintah Kabupaten Magelang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan berbagai teknik, diantaranya FGD, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan</p>	<p>dalam semangat pengembangan Obyek Wisata Terasering yang telah melibatkan pemerintah desa, pokdarwis, dan masyarakat. Namun, networked structure yang ada belum memiliki kesatuan visi dan cita-cita menuju terbentuknya sebuah desa wisata. Terdapat kekhawatiran akan adanya tumpang tindih atau hilangnya lahan bisnis wisata di kalangan Pokdarwis, Balkondes, dan BUMDes karena pembagian kerja yang tidak jelas jika suatu saat dibentuk networked structure yang lebih terorganisir</p>		

Nomor	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan dengan Penelitian Ini
12.	Prasiasa (2022) Pengembangan Daerah Wisata dalam Bingkai Politik Pariwisata	Artikel ini bertujuan untuk membahas pembangunan pariwisata dalam kerangka politik pariwisata, khususnya bagaimana pariwisata dapat mengubah struktur kekuasaan dan nilai-nilai di suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW).	Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kajian teoretis, referensi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Metode tinjauan pustaka juga dikenal sebagai metode literatur atau <i>Comprehensive Literature Review</i> , yang mengkaji dan membahas materi secara teoretis dan deskriptif, dan dalam konteks tertentu dapat dilakukan	Pengetahuan tentang penyusunan kebijakan serta interaksi elemen-elemen dalam lingkungan kebijakan adalah mutlak diketahui jika ada kemauan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan pariwisata, pengembangan pariwisata, dan manajemen sumber daya pariwisata. Salah satu solusi yang diajukan untuk mencegah penyalahgunaan pengaruh kekuasaan dalam pariwisata adalah dengan menerapkan strategi manajemen publik dalam aktivitas kepariwisataan. Hal ini diharapkan dapat mendorong pembangunan pariwisata berkelanjutan yang melindungi	Perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan pada interaksi elemen-elemen lingkungan kebijakan. Persamaannya penelitian ini fokus pada pengembangan wisata dan politik pariwisata

Nomor	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan Penelitian Ini
			perbandingan dengan sebuah konsep	masyarakat dan sumber daya nasional, baik sumber daya alam maupun sumber daya budaya	
13.	Bidi, (2023)	Dkk. Relasi Kuasa Desa Wisata Berkembang Detusoko Barat Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur	Pendekatan penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan	Hasil penelitian menemukan bahwa relasi kuasa yang terjadi dalam proses pengembangan Desa Wisata menemukan adanya integrasi ketergantungan dimana untuk mendukung proses pengembangan sektor Desa Wisata selain dana yang dimiliki desa yang minim sumber daya seperti lembaga-lembaga yang ada di daerah tersebut, selain itu terlihat adanya interaksi yang terjadi dalam proses pengembangan tersebut yaitu adanya kekuatan-kekuatan yang memiliki kepentingan.	Perbedaannya penelitian ini lebih fokus pada kuasa desa wisata Persamaannya penelitian ini samasama berorientasi pada area formal dan nonformal.

Nomor	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan dengan Penelitian Ini
14.	Hamida Dkk. (2023) Analisis Potensi dan Upaya Pengembangan Desa Wisata Tambaksari Kabupaten Karawang	Mengetahui potensi-potensi yang bisa dijadikan wisata berbasis ecotourism serta persepsi masyarakat tentang pengembangan Desa Wisata Tambaksari	Menggunakan pendekatan kualitatif dan partisipatif dengan tiga metode: survei langsung, Focus Group Discussion (FGD) dengan metode Six Thinking Hats, dan data sekunder	Hasil kajian menemukan konflik pengelolaan the commons di Bleberan berakar dari formasi kewargaan yang kontestatif namun tanpa diimbangi kapasitas negosiasi secara memadai.	Perbedaannya penelitian ini fokus penelitian in lebih memfokuskan pada pengembangan Desa Wisata bukan Persamaannya penelitian ini yaitu fokus pada pengembangan Desa Wisata
15.	Helmi (2024) Konflik Kepentingan dalam Implementasi Pembangunan Wisata Religi di Desa Bogoran	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik kepentingan yang terjadi, resolusi konflik, dan menganalisis implementasi pembangunan wisata religi di Desa Bogoran, Kecamatan Sapuran, Wonosobo	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi	Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam pembangunan wisata religi di Desa Bogoran, terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa. Konflik ini menyebabkan pembangunan menjadi tidak ideal sesuai dengan teori implementasi menurut Edward III. Namun, konflik ini akhirnya bisa diselesaikan	Perbedaannya penelitian ini tidak membahas lebih jauh tentang implementasi pembangunan wisata Persamaannya penelitian ini fokus pada konflik kepentingan dan pembanguan wisata

1.7. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir konflik kepentingan dalam penelitian ini berdasarkan pada fenomena gap konflik kepentingannya yaitu belum semua desa yang mengimplementasikan Desa Wisata, kemudian belum adanya peraturan desa sebagai turunan dari peraturan bupati tentang Desa Wisata baik yang berupa Perdes maupun penerapannya dilapangan karena berdasarkan data yang dilapangan bahwa dari 12 Desa Wisata yang sudah ada dalam Peraturan daerah hanya ada 4 desa yang melaksanakan itu, juga untuk peraturan Desa Wisata. Selanjutnya permasalahan konflik kepentingan pada kekuasaan Bupati dan konflik kepentingan kebijakan dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Serta konflik kepentingan perencanaan dan alokasi anggaran yang selanjutnya dasar teori yang digunakan adalah pendekatan institusional baru, politik pariwisata, konflik dan konflik kepentingan, aktor dalam kebijakan serta konsep Desa Wisata.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu partisipasi politik masyarakat lokal, komitmen pemerintah daerah, kebijakan pajak dan insentif, kerjasama antar partai, lobbying dan advokasi, pendekatan bipartisanship, penyusunan regulasi yang jelas, pengembangan hubungan dengan pemerintah pusat, transparansi dan akuntabilitas serta pemberdayaan politik masyarakat adat.

Keberlanjutan yang diharapkan adalah masyarakat sadar pariwisata dan pemberdayaan lokal, turunan peraturan kepariwisataan sampai di Desa Wisata serta keberlanjutan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Grand theory, middle theory, dan low theory dari disertasi ini dengan judul "POLITIK PARIWISATA: SIMTOM KONFLIK KEPENTINGAN PENGEMBANGAN DESA WISATA", untuk menyusun kerangka teoretis yang berjenjang dari konsep yang paling luas hingga yang paling spesifik. di bahas sebagai berikut:

1. *Grand Theory*: Teori Konflik Sosial

Grand theory untuk disertasi Anda dapat menggunakan Teori Konflik Sosial yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Karl Marx, Ralf Dahrendorf, atau Lewis Coser. Teori ini melihat masyarakat sebagai arena di mana berbagai kelompok bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Dalam konteks pengembangan desa wisata, konflik kepentingan dapat muncul sebagai hasil dari persaingan antar berbagai pemangku kepentingan dalam memanfaatkan potensi pariwisata.

2. *Middle Theory*: Teori Ekonomi Politik Pariwisata

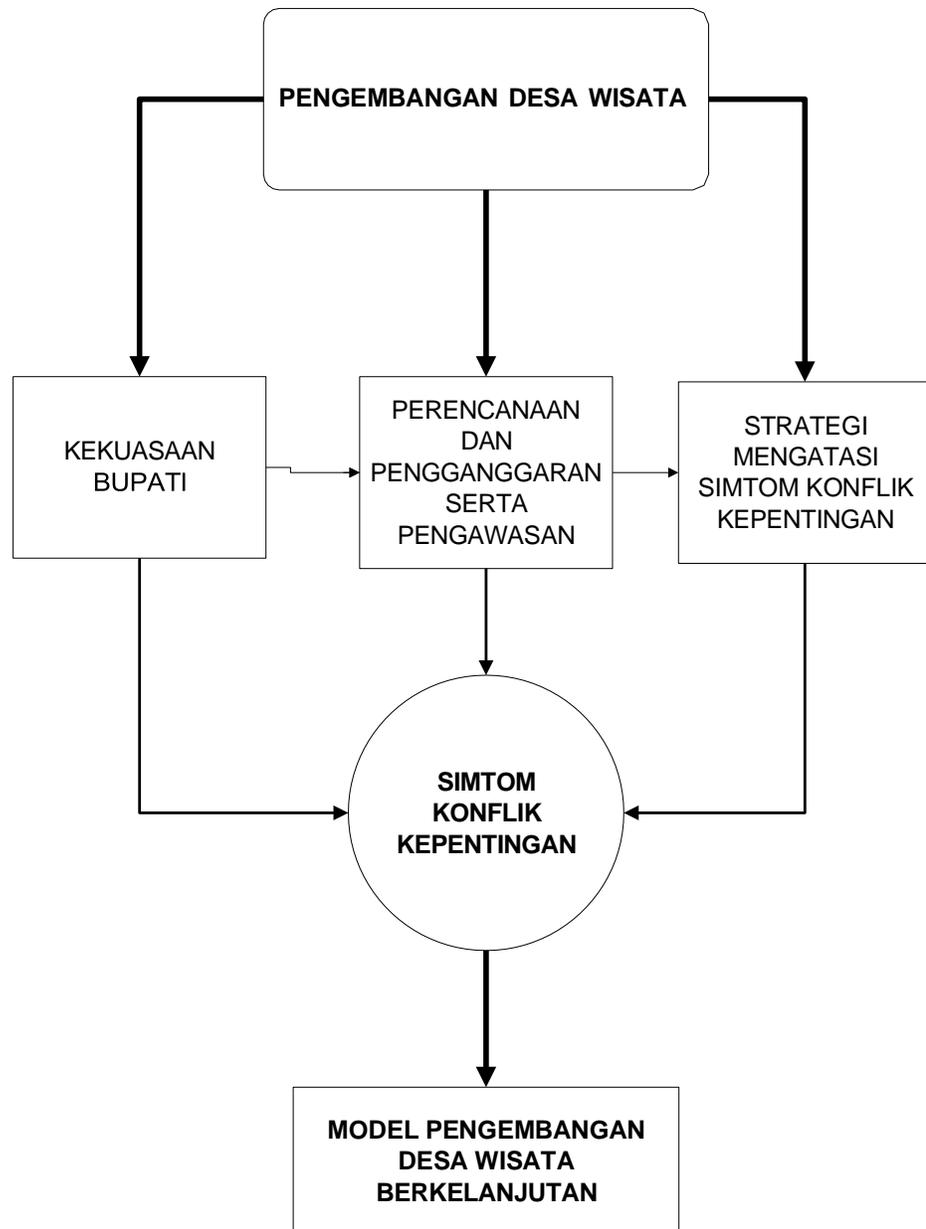
Middle theory, Teori Ekonomi Politik Pariwisata dapat digunakan untuk menghubungkan grand theory dengan konteks spesifik pariwisata. Teori ini membahas bagaimana kekuatan ekonomi dan politik berinteraksi dalam pembentukan kebijakan dan praktik pariwisata. Teori ini dapat membantu menjelaskan bagaimana berbagai aktor (pemerintah, swasta, masyarakat lokal) saling mempengaruhi dalam proses pengembangan desa wisata.

3. *Low Theory*: Teori Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community-Based Tourism Development*) Sebagai *low theory* yang lebih spesifik, Teori Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat dapat digunakan untuk menganalisis dinamika konflik kepentingan di tingkat desa wisata. Teori ini berfokus pada pentingnya keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata, serta potensi konflik yang muncul ketika kepentingan masyarakat berbenturan dengan kepentingan pihak luar atau elit lokal.

Dengan menggunakan kerangka teoretis ini, dapat menganalisis:

1. Bagaimana kekuasaan bupati dalam membuat kebijakan untuk mewujudkan pengembangan Desa Wisata? konflik kepentingan muncul sebagai hasil dari persaingan sumber daya dalam pengembangan desa wisata (*Grand Theory*)
2. Bagaimana simtom konflik kepentingan pada perencanaan dan penganggaran dalam pengembangan Desa Wisata? Peran dan interaksi berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengembangan pariwisata di tingkat desa (*Middle Theory*).
3. Bagaimana strategi mengatasi simtom konflik kepentingan dalam pengembangan Desa Wisata. Dinamika spesifik yang terjadi di tingkat masyarakat lokal, termasuk potensi konflik dan strategi pemberdayaan dalam konteks pengembangan desa wisata (*Low Theory*).

1.7 Kerangka Berpikir



Keterangan:
→ Penyebab langsung
→ Akibad Tidak Langsung

Gambar 1.1 Kerangka Pikir

1.8 Penggunaan Metodologi

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai analisis politik pariwisata dalam perspektif konflik kepentingan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan metode dan pendekatan kualitatif, sesuai dengan fokus permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan kalimat dari individu, buku, dan sumber lain. Dengan pendekatan fenomenologi, dalam penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data peneliti mampu menggali informasi yang lebih dalam mengenai interpretasi individu yang diteliti (Creswell, 1994). Penelitian kualitatif merupakan suatu metode untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, sebagai suatu metode untuk mengeksplorasi fenomena, dan suatu metode untuk memberikan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif juga merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh sebab itu, dalam penelitian kualitatif peneliti itu sendiri bertindak sebagai instrumen sehingga dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah *human instrument*, yang berarti peneliti yang bertindak sebagai instrument penelitian itu sendiri.

Alasan peneliti untuk menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menemukan dan memahami fenomena yang terjadi. Kemudian, juga dapat menjelaskan secara terperinci mengenai temuan-temuan yang ada di lokasi penelitian. Metode ini kemudian juga mengeksplorasi fenomena dengan lebih luas untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Pada penelitian ini merupakan kualitatif untuk meneliti studi kasus untuk fokus mendapatkan penjelasan fenomena, dari politik pariwisata dengan unit analisis aktivitas Pengembangan Desa Wisata pada kekuasaan bupati, tahap perencanaan dan penganggaran sampai strategi meminimalisir simtom konflik kepentingan.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi pengambilan data dari informannya ada di desa-desa wisata. Tempat dilaksanakan pertemuan dengan para informan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian dan rumusan masalah yang telah diajukan. Lokasi penelitian tersebut, antara lain:

- 1) Kantor Kepala Daerah, yang diwawancarai yaitu Sekda, Kadis Pariwisata, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan desa, inspektur, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Kaban Bappeda, Kaban Keuangan, Staf Ahli, Sekda, Staf khusus kemudian mereka diwawancarai terkait prioritas anggaran, prioritas perencanaan dan penganggaran yang telah diambil untuk setiap tahapannya

2) Lokasi kedua, di Hotel Swiss Bell Maleosan Manado bersama 35 Kepala Desa Wisata pembahasannya yaitu tentang bagaimana kesenjangan prosesnya dan mengapa tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan bertempat di balai desa saat itu hadir juga informan pendukung bersama dengan pejabat yang hadir dipertemuan pertama ditambah 2 orang anggota DPRD.

3) Lokasi Ketiga, sama dengan lokasi kedua yaitu Hotel Swiss Bell Maleosan Manado, bersama akademisi, pakar pariwisata, LSM, Staf Khusus, sekda, dan Kadis Pariwisata. Pada pembahasan ketiga dibahas tentang peran Bupati untuk penanganan simtom konflik kepentingan Pengembangan Desa Wisata.

4) Lokasi keempat, yaitu di 35 Desa Wisata di mana peneliti mewawancarai mendalam dan melakukan observasi langsung, sampai pada masyarakat dan tokoh masyarakat, pemilik objek wisata, dan LSM. Proses ini dilakukan berkali-kali atau peneliti bolak-balik untuk pengambilan data.

Alasan pemilihan Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara, yaitu:

1. Potensi Wisata yang Besar: Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki banyak potensi wisata alam dan budaya yang belum dikembangkan secara optimal. Desa-desa di kabupaten ini memiliki pesona alam yang indah, seperti pantai, air terjun, dan hutan. Selain itu, terdapat pula potensi wisata budaya seperti upacara adat, tarian tradisional, dan kerajinan khas daerah. Pengembangan Desa Wisata dapat menjadi solusi untuk memanfaatkan potensi tersebut.

2. Upaya Pengembangan Desa Wisata: Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berupaya mengembangkan desa-desa wisata di daerahnya. Namun, dalam pelaksanaannya ditemui berbagai tantangan dan kendala. Penelitian ini dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada dan merumuskan solusi yang tepat.
3. Kebaruan Topik Penelitian: Isu konflik kepentingan dalam pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum banyak diteliti sebelumnya. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam bidang politik pariwisata di daerah.
4. Relevansi dengan Pembangunan Daerah: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.
5. Konflik Kepentingan yang Kompleks: Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berpotensi memicu konflik kepentingan di antara berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, investor, masyarakat lokal, dan kelompok adat. Hal ini menarik untuk diteliti, terutama dalam melihat dinamika dan dampaknya terhadap pembangunan pariwisata daerah.

Selain alasan masalah penelitian yang sudah dikemukakan, ada juga alasan minat dari penulis untuk pariwisata dan politik, alasan waktu penelitian dan waktu studi, alasan biaya penelitian dan terakhir alasan karena kemudahan.

1.8.3 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian dibutuhkan dalam sebuah penelitian supaya pembahasan yang ada di dalam sebuah penelitian tidak meluas, sehingga penelitian dapat terfokus pada pembahasan yang telah ditentukan. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan pemerintah dan stakeholder dalam merumuskan Politik Pariwisata yang sesuai dengan pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Survei awal. Deskripsinya, penelitian ini juga fokus untuk meneliti kebijakan yang sudah dilakukan, sementara dan yang akan dilakukan kedepan, dengan melibatkan pihak informan kunci dan informan penunjang yang dikaji penting terlibat dalam aktivitas Desa Wisata yang terkait dengan politik pariwisata.

1.8.4 Instrumen Penelitian

Instrumen secara umum merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena yang digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat informasi untuk penilaian, pengambilan keputusan, dan akhirnya memahami fenomena tersebut. Dalam makna luas, instrumen penelitian merujuk pada berbagai peralatan yang digunakan selama melakukan penelitian. Sehingga, instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab masalah penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini (Mulyana, 2008), dapat diuraikan, sebagai berikut:

- a. Pedoman Wawancara Pedoman wawancara memuat mengenai daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan. Pedoman wawancara ini akan memuat pokok-pokok penelitian yang akan ditanyakan melalui proses wawancara dengan informan. Sehingga, sebelum wawancara dilaksanakan, penelitian ini membuat pedoman wawancara untuk dijadikan sebagai acuan ketika melaksanakan wawancara untuk menghindari bias informasi. Namun proses wawancara tidak hanya terfokus pada pedoman wawancara yang telah disusun sehingga penelitian ini dapat mengajukan pertanyaan tambahan yang relevan kepada informan untuk menambah informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, tetapi intinya dapat menggali informasi untuk pemahaman terhadap konflik kepentingan dalam Pengembangan Desa Wisata.
- b. Pedoman Observasi Pedoman observasi memuat mengenai hal-hal yang akan diamati di lokasi penelitian sehingga akan menghasilkan informasi yang dapat diolah untuk dijadikan sebagai data primer yang dapat melengkapi hasil wawancara. Pedoman observasi diperlukan supaya observasi di lokasi penelitian menjadi terfokus. Terutama kunjungan di Desa Wisata.
- c. Notulensi dalam sebuah pelaksanaan penelitian menjadi sangat penting bagi peneliti untuk mencatat temuan-temuan dan hasil pengamatan di lokasi penelitian notulensi ini akan berfungsi untuk mencatat hasil wawancara dengan informan yang telah dipilih sehingga notulensi ini merupakan bagian dari data primer. Notulensi pada saat *Focus Group Discussion dan sharing knowledge* dengan para informan dalam penelitian ini

- d. Pedoman Dokumentasi Pedoman dokumentasi diperlukan dalam sebuah penelitian untuk dokumendokumen yang dikumpulkan merupakan dokumen yang relevan dan dapat menunjang penelitian. Pedoman dokumentasi akan menganalisis data yang diperoleh dari buku, gambar atau foto, laporan keuangan, dan sebagainya. Seperti: RPJMD, Renstra Dinas Pariwisata, dan profil desa, Peraturan desa, data-data BUMDes, dan foto-foto Objek penelitian.
- e. Perekam suara Perekam suara akan digunakan pada saat penelitian ini melaksanakan wawancara dengan informan. Adanya alat perekam suara, wawancara antara peneliti dengan informan akan terekam dengan baik sehingga penelitian ini tidak kehilangan informasi yang telah diperoleh dari informan. Adanya video wawancara membuat penelitian ini lebih memahami secara mendalam informasi yang telah diperoleh sebagai hasil wawancara.

1.8.5 Sumber Data

1.8.5.1 Informan

Informan merupakan orang yang memberikan penjelasan atau informasi secara rinci dalam proses penelitian. Informan dapat memberikan informasi secara lengkap mengenai berbagai hal yang ingin diketahui oleh peneliti. Informan dalam sebuah penelitian memiliki peranan seperti: menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti; memperkenalkan atau menghubungkan peneliti dengan orang lain yang memiliki pengetahuan yang sama.

Selanjutnya menyediakan akses dan meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai berbagai hal di lokasi penelitian Desa Wisata ini dan membantu menafsirkan makna pengamatan penelitian ini. Informan dalam sebuah penelitian kualitatif, dibedakan menjadi dua jenis yaitu Informan Kunci dan Informan Pendukung. Informan kunci merupakan informan yang menjadi sumber informasi utama dalam proses penelitian. pemilihan informan kunci tidak dapat dilakukan secara acak. Penelitian ini harus menentukan kriteria orang yang layak untuk dijadikan sebagai informan kunci.

Pemilihan informan kunci merupakan hal yang sangat penting sekaligus akan menentukan validitas data serta hasil penelitian. Harus berhati-hati dalam menentukan informan kunci supaya penelitian tidak mengandung bias karena salah menentukan informan. Penentuan informan kunci dengan menggunakan metode *purposive sampling* bertujuan supaya informan yang diwawancarai dalam penelitian ini benar-benar mengerti mengenai tahapan dalam proses penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi, dan legitimasi serta evaluasi, sedangkan informan pendukung digunakan *snowball sampling*. Penjelasannya kenapa penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, untuk informan dalam penelitian ini yang merupakan aktor kunci yang benar-benar terlibat dalam menentukan prioritas kebijakan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yaitu dari pihak kepala desa. Kaban Keuangan, Kadis Pariwisata, Kaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Staf Khusus Bupati, anggota DPRD, Pemilik objek penelitian, dan *expert*.

Informan pendukung merupakan informan yang dapat memberikan informasi dengan mengisinya lewat angket dan informan pendukung yang mengikuti FGD dan terkait dengan fokus penelitian. Untuk menentukan informan pendukung, penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan bantuan informan ke informan dikembangkan lagi sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh informan yang terlibat dalam penelitian terkait Pengembangan Desa Wisata baik sebagai informan kunci maupun informasi pendukung. Penelitian ini menghasilkan informasi yang diperoleh dari informan. Kemudian, informasi tersebut dikumpulkan dan dijadikan sebagai sumber data yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam sebuah penelitian, sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sarantakos, 1998).

Sumber Data Primer dan data primer dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh penelitian ini secara langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama yaitu responden atau informan melalui proses wawancara atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Sehingga dalam penelitian ini data yang dijadikan sebagai data primer yaitu data yang diperoleh, sebagai berikut:

- a) Informan kunci dan informan penunjang
- b) Notulensi atau catatan yang diperoleh selama melaksanakan pertemuan penelitian.

Berikut nama dan jabatan informan yang dapat dilihat pada Tabel 1.2, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Nama dan Pekerjaan Informan Dalam Penelitian Ini

Nomor	Nama	JUMLAH	KODE INFORMAN
	INFORMAN PEMERINTAH		
1.	SEKDA	1	I ₁
2.	ASSISTEN	3	I ₂
3.	KEPALA DINAS	10	I ₃
4.	CAMAT	7	I ₄
5.	KEPALA DESA/SANGADI	35	I ₅
	INFORMAN MASYARAKAT		
6.	TOKOH AGAMA	1	I ₆
7.	TOKOH MASYARAKAT	12	I ₇
8.	TOKOH ADAT	12	I ₈
9.	WISATAWAN	2	I ₉
	INFORMAN AKADEMISI DAN PROFESIONAL	2	
10.	DOSEN	3	I ₁₀
11.	PROFESOR	1	I ₁₁
12.	IPI	1	I ₁₂
13.	PEMILIH OBJEK WISATA	5	I ₁₃
14.	DPRD	3	I ₁₄
15.	DIASPORA	2	I ₁₅
	TOTAL	100	

1.8.5.2 Situasi Sosial

Dalam penelitian kualitatif, istilah populasi dan sampel tidak digunakan sebagaimana dengan penelitian kuantitatif, melainkan digambarkan oleh *Spradley*, (1997) sebagai “*social situation*” atau tidak serangkaian tempat yaitu (*place*), Pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang saling berinteraksi yang disebut situasi sosial secara sinergis.

Dalam penelitian kualitatif, seseorang memulai dengan kasus tertentu dengan konteks sosial tertentu, dan hasil penelitian tidak diterapkan pada populasi tetapi dipindahkan ke tempat lain dalam konteks sosial yang mirip dengan konteks sosial tersebut. Populasi tidak digunakan dalam penelitian kualitatif. Subjek penelitian kualitatif yaitu partisipan penelitian, informan, teman dan pengajar penelitian. Dalam menganalisis kondisi sosial untuk keperluan penelitian ini peneliti mendeskripsikan data terkait konteks dari profil Desa, pemerintah, dan masyarakat desa yang berpartisipasi. Juga, peneliti menambang dan mengambil sampel yang disengaja saat mereka memasuki situasi sosial tertentu. Pendekatan ini berguna mengingat hanya sedikit orang yang mengetahui sumber data dan kebijakan penetapan Desa Wisata.

1.8.5.3 Dokumen

Penelitian ini menggunakan buku pedoman desa dan aturan daerah atau produk hukum daerah dalam wisata sebagai sumber literatur yang dinilai sesuai dengan relevansi dengan topik penelitian untuk dijadikan sebagai sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang keberadaannya hanya digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau mendukung data primer. Sehingga pada umumnya data sekunder hanya berupa dokumen-dokumen pendukung penelitian yang diperoleh peneliti selama melaksanakan penelitian.

Data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Studi literatur yang dilakukan oleh penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari buku, jurnal, atau karya ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian;
- b) Wawancara singkat penelitian ini dengan informan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- c) Dokumentasi yang diperoleh penelitian ini dari pengumpulan data di lokasi penelitian, dokumentasi dapat berupa foto atau gambar, laporan keuangan, peraturan daerah, dan lain-lain.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan suatu kumpulan informasi yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan informasi. Kemudian, informasi yang telah berubah menjadi sebuah data, diolah dan dianalisis melalui metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu. Pada penelitian kualitatif, bentuk data yang dibutuhkan oleh penelitian ini adalah berupa kalimat atau narasi dari subjek penelitian (Suyanto dan Sutinah, 2000). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah berupa studi literatur, wawancara, observasi, *focus group discussion* dan studi dokumentasi, yang terkait dengan konflik kepentingan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.8.6.1 Wawancara

Wawancara mendalam (*in depth interview*) dilakukan untuk mengumpulkan data dari para *stakeholders* yang terlibat dan mengetahui benar mengenai Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dalam hal ini hanya orang-orang kunci yaitu 8 (delapan) orang yang menjadi informan untuk diwawancarai. Melalui wawancara ini, kebenaran, kekuatan (*validitas*), dan klarifikasi (*clarification*) data dapat capai. Wawancara ini dibantu dengan seperangkat panduan wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada informan, yang terkait dengan politik pariwisata dalam konflik kepentingan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

1.8.6.2 Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengunjungi langsung tempat penelitian dan mengamati secara seksama keadaan-keadaan yang sesungguhnya terjadi di lapangan serta mengamati gejala-gejala dan fenomena-fenomena yang ada terkait dengan konflik kepentingan pemerintah mengenai Desa Wisata dalam Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Demikian juga karena penelitian ini dilakukan oleh peneliti yang juga merupakan Bupati maka penting sekali observasi untuk bisa membandingkan jika jawaban informan terpengaruh karena peneliti juga merupakan Bupati Bolaang Mongondow Timur, sehingga validasi dan reliabilitasnya bisa tidak terpenuhi. Observasi juga merupakan triangulasi peneliti yang dilakukan dalam penelitian ini untuk menjaga validitas dan reliabilitas informasi.

1.8.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder atau data-data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan konflik kepentingan, seperti data statistik yaitu Sulawesi Utara dalam Angka, laporan penelitian untuk pembuatan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah dan, laporan pemerintah daerah terkait: Renstra dan artikel. Data yang didapat dari studi dokumentasi ini dibandingkan dengan data-data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan *focus group discussion* yang kemudian dianalisa untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

1.8.6.4 Focus Group Discussion

Focus group discussion digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang maksimal dan lengkap mengenai segala hal yang berkaitan dengan kemudahan dan permasalahan dalam konflik kepentingan Pengembangan Desa Wisata. Dalam *focus group discussion* ini selain informan kunci juga akan melibatkan 10 (sepuluh) informan penunjang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penerapan, seperti aparat desa dan kepala seksi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga ada gambaran mana desa yang berhasil dan belum berhasil mengembangkan Desa Wisata.

1.8.6.5 Studi Literatur

Studi literatur merupakan langkah awal untuk memperkaya atau mengembangkan pengetahuan dan argumentasi peneliti mengenai masalah sosial atau konsep yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan buku pedoman desa dan aturan daerah atau produk hukum daerah dalam wisata sebagai sumber literatur yang dinilai sesuai dengan relevan dengan topik penelitian untuk dijadikan sebagai sumber data sekunder. Ditelusuri juga penelitian-penelitian baik yang diterbitkan berupa jurnal yang terkait dengan Pengembangan Desa Wisata, konflik kepentingan dan kebijakan publik, serta politik maupun laporan kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1.8.6.6 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder atau data-data yang telah diperoleh berkaitan dengan penerapan kebijakan Desa Wisata, seperti data statistik yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Angka, laporan penelitian untuk pembuatan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah dan Naskah Akademis, laporan pemerintah daerah terkait: RPJMD dan Renstra, artikel, dan berbagai tulisan mengenai obyek penelitian ini. Data yang didapat dari studi dokumentasi ini dibandingkan dengan data-data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan *focus group discussion* yang kemudian dianalisa untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

1.8.7 Teknis Analisis Data

Menurut Bogdan, *dalam* Sugiyono (2006) analisis data adalah: “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan”

Data yang diperoleh ketika melakukan penelitian ini diolah dengan teknik analisis data yang diperkenalkan oleh Miles *et al.* (2014) ini terdiri atas tiga tahapan atau alur yang terjadi secara bersamaan yaitu kondensasi data, display atau penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang dapat diuraikan, sebagai berikut:

1) Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan “proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari proses pengumpulan data”. Pada tahapan kondensasi, data yang telah diperoleh penelitian ini selama melaksanakan penelitian akan disaring sehingga data yang diperoleh adalah data yang benar-benar dibutuhkan oleh peneliti.

Sehingga nantinya setelah tahapan reduksi data selesai, data yang dihasilkan adalah data final yang dapat dianalisis dengan menggunakan teori yang telah ditentukan oleh penelitian ini yaitu lima tahapan kebijakan. Tahapan kondensasi data sebenarnya juga merupakan tahapan analisis sehingga pilihan-pilihan penelitian ini tentang bagaimana data dikode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, merupakan pilihan analitis dari penelitian ini. Dengan begitu, proses kondensasi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi.

Contohnya, dalam wawancara informasi yang diberikan jika terkonfirmasi ada ketidakkonsistenan dengan data maka informasi itu dibuang. Misalkan karena jawaban informan tidak konsisten karena yang mewawancarai adalah bupati sendiri sebagai peneliti, maka data dibuang.

2) Penyajian Data

Setelah tahapan kondensasi data dan diperoleh data final dari sebuah penelitian, maka tahapan selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Penyajian data dimaknai oleh sebagai “sekumpulan informasi tersusun yang memberi adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan”. Pada tahapan ini, penelitian ini akan menganalisis data final yang telah disajikan dengan teori dan konsep yang digunakan di dalam penelitian ini, kemudian dimasukkan dalam hasil penelitian dan pembahasan.

3) Penarikan

Kesimpulan tahapan terakhir dari proses analisis data adalah penarikan kesimpulan yang dimaknai sebagai “penarikan arti dari data yang telah disajikan dan analisis menggunakan teori dan konsep yang digunakan di dalam penelitian”. Kemudian, selain penarikan kesimpulan juga dilakukan verifikasi untuk meninjau kembali hasil penelitian dan memastikan bahwa data hasil penelitian dan analisis dengan menggunakan teori dan konsep yang telah dipilih telah tersaji dan terpaparkan secara lengkap

Pentingnya memastikan kesimpulan yang diambil atau ditarik telah sesuai dengan data dan analisis yang diperoleh. Artinya ada konsistensi antara permasalahan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan teoritis dan empiris, hasil penelitian dan pembahasan sampai dengan kesimpulan.

1.8.8 Keabsahan Data

1.8.8.1 *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Ini mengacu pada seberapa jauh data yang peneliti gunakan dapat dipercaya atau dianggap valid. Untuk mencapai derajat kepercayaan yang tinggi, penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan berasal dari sumber yang dapat dipercaya, metode pengumpulan data yang baik, dan bahwa data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Karena peneliti adalah Bupati yang berpotensi bias maka dilakukan triangulasi peneliti dengan peneliti lain untuk menjamin validitas dan reabilitas dari hasil wawancara.

1.8.8.2 *Dependability* (Ketergantungan)

Ketergantungan berkaitan dengan konsistensi dan kestabilan data seiring waktu. Dalam konteks metodologi penelitian, ketergantungan mengacu pada keandalan data dan kemampuan untuk mengandalkan data tersebut untuk memberikan hasil yang konsisten jika studi tersebut diulang. Untuk menjamin data reliabel dan valid.

1.8.8.3 *Transferability* (Keteralihan)

Konsep ini menyoroti sejauh mana hasil penelitian dan temuan dapat diterapkan atau ditransfer ke konteks atau populasi yang berbeda. Untuk meningkatkan keteralihan, penelitian harus memperhatikan keragaman dalam sampel atau konteks, dan memperjelas batasan-batasan generalisasi temuan.

1.8.8.4 *Confirmability* (Kepastian)

Ini mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat dianggap objektif dan tidak dipengaruhi oleh bias peneliti. Kepastian dapat ditingkatkan melalui transparansi metodologi penelitian, penggunaan teknik verifikasi oleh peneliti independen, dan refleksi yang jelas tentang asumsi dan posisi peneliti. Pengujian keabsahan data dalam sebuah penelitian wajib untuk dilakukan supaya data yang diperoleh penelitian ini ketika di lapangan menjadi lebih akurat. Pemeriksaan terhadap keabsahan data yang diperoleh.

1.8.8.5 Triangulasi

Menurut Moloeng (2013), triangulasi adalah: “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Kemudian, “triangulasi sumber data berarti pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh dengan cara membandingkan dan memeriksa ulang kebenaran suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda”

Triangulasi sumber data dalam penelitian ini berarti pengecekan atau pemeriksaan kembali hasil wawancara dengan tiga puluh informan dan dokumen atau hasil observasi yang diperoleh peneliti selama melaksanakan penelitian. Uji keabsahan data nantinya akan berkaitan dengan validitas dan keakuratan data yang diperoleh. Sehingga dari uji keabsahan data ini akan diperoleh data yang benar-benar mendukung dan sesuai dengan fokus permasalahan dan tujuan di dalam penelitian. Uji keabsahan data juga akan meningkatkan kredibilitas penelitian yang dilakukan karena data yang diperoleh dan disajikan telah diuji keabsahannya.

Jika peneliti merupakan bagian dari penelitian yang sedang dilakukan, maka triangulasi penelitian menjadi penting untuk menjaga objektivitas dan validitas hasil. Berikut adalah beberapa pendekatan triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber Data:

- a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan partisipan lain, analisis dokumen, atau observasi yang melibatkan pihak-pihak yang tidak terkait langsung dengan peneliti.
 - b. Membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan.
2. Triangulasi Metode:
- a. Menggunakan kombinasi metode pengumpulan data, seperti wawancara, survei, dan analisis dokumen.
 - b. Membandingkan data yang diperoleh melalui metode yang berbeda untuk menguji konsistensi dan keakuratan informasi.
3. Triangulasi Peneliti:
- a. Melibatkan peneliti lain yang independen untuk melakukan verifikasi, interpretasi, dan analisis data.
 - b. Mendiskusikan temuan dan interpretasi dengan peneliti lain untuk mendapatkan perspektif yang berbeda.
4. Triangulasi Teori:
- a. Menggunakan berbagai perspektif teoritis dan kerangka konseptual untuk menganalisis dan menafsirkan data.
 - b. Membandingkan temuan penelitian dengan teori-teori yang relevan untuk meningkatkan pemahaman dan validitas.

5. Triangulasi Konteks:

- a. Mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan organisasional di mana penelitian dilakukan.
- b. Menganalisis bagaimana konteks dapat memengaruhi interpretasi dan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

Berbagai pendekatan triangulasi, peneliti dapat meningkatkan kepercayaan, validitas, dan objektivitas hasil penelitian, bahkan ketika peneliti sendiri merupakan bagian dari subjek yang diteliti. Berikut referensi yang dapat digunakan untuk memperkuat argumen mengenai triangulasi penelitian ketika peneliti merupakan bagian dari penelitian:

1. Denzin (1978). Dalam bukunya *“The research act: A theoretical introduction to sociological methods”* yang memperkenalkan konsep triangulasi sebagai strategi untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif.
2. Patton (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.) menjelaskan berbagai pendekatan triangulasi, termasuk triangulasi sumber data, metode, dan perspektif teoritis.
3. Yin, R. K. (2018) dalam bukunya *“Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)”* menekankan pentingnya triangulasi dalam studi kasus, terutama ketika peneliti merupakan bagian dari konteks yang diteliti.
4. Flick, U. (2018). Dalam bukunya *“An introduction to qualitative research (6th ed.)”* membahas berbagai pendekatan triangulasi sebagai strategi untuk

meningkatkan kedalaman, kompleksitas, dan validitas dalam penelitian kualitatif.

5. Merriam, S. B., and Tisdell, E. J. (2016) dalam bukunya "*Qualitative research: A guide to design and implementation (4th ed.)*" menekankan pentingnya triangulasi dalam penelitian kualitatif, terutama untuk mengatasi bias yang mungkin timbul ketika peneliti terlibat dalam penelitian.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Profil Geografis dan Demografis Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai berikut:

2.1.1 Keadaan Geografi

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis, luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur $\pm 866,372 \text{ Km}^2$ atau $\pm 5,97\%$ dari Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Utara $\pm 14.500,275 \text{ Km}^2$. Luas dan Batas Wilayah Administrasi. Batas-batas wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Maluku dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku;

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdiri dari 81 desa yang tersebar di 7 (tujuh) wilayah. Kecamatan Modayag adalah Kecamatan terluas, dengan luas $\pm 190,061$ Km² dan Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Mooat dengan luas $\pm 92,278$ Km², selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan menurut Luas dan Jumlah Desa Di
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km²)	(%)	JUMLAH DESA
1	Tutuyan	156,300	18,04	10
2	Kotabunan	133,827	15,44	15
3	Motongkad	122,667	14,15	11
4	Nuangan	133,814	15,44	11
5	Modayag	190,061	21,93	14
6	Modayag Barat	37,425	4,31	10
7	Mooat	92,278	10,65	10
	JUMLAH	866,372	100,00	81

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2024

Letak astronomis merupakan letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis-garis yang melingkari permukaan bumi secara melintang. Sedangkan garis bujur merupakan garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan/secara melintang.

Letak astronomis kabupaten Bolaang Mongondow Timur secara detail berada di antara 0° 27' 59,69" - 0° 57' 24,47" Lintang Utara dan 124° 20' 6,32" - 124° 41' 55,89" Bujur Timur.

Geostrategis merupakan suatu strategi yang memanfaatkan kondisi lingkungan didalam upaya mewujudkan kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan TNI Angkatan Darat Republik Indonesia. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan salah satu wilayah persediaan logistik, sehingga diperlukan prasarana dan sarana penunjang kepentingan tersebut. Kondisi Kawasan, Wilayah Bolaang Mongondow Timur memiliki dua kawasan yang dominan, yaitu kawasan pesisir dan pegunungan Kawasan pesisir Bolaang Mongondow Timur, meliputi Kecamatan Kotabunan, Tutuyan, Motongkad, dan Nuangan. Memiliki karakteristik pesisir dan laut yang berpotensi untuk agribisnis/agroindustri, wisata bahari, wisata tirta dan wisata aerosport, komoditas kelapa, cengkeh, kakao, pala, padi sawah dan jagung. Selain itu kawasan pesisir juga memiliki potensi sumberdaya mineral emas, batuan dan batu gamping sebagai bahan baku industri semen.

Kawasan pegunungan Bolaang Mongondow Timur yang meliputi Kecamatan Mooat, Modayag, dan Modayag Barat, yang memiliki karakteristik pegunungan dengan potensi komoditas pertanian hortikultura, perkebunan kopi (Arabica) dan komoditas ikan sidat. Selain itu wilayah ini juga memiliki potensi wisata tirta, wisata agro, wanawisata, geowisata dan aerowisata serta potensi sumberdaya emas, batuan dan panas bumi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

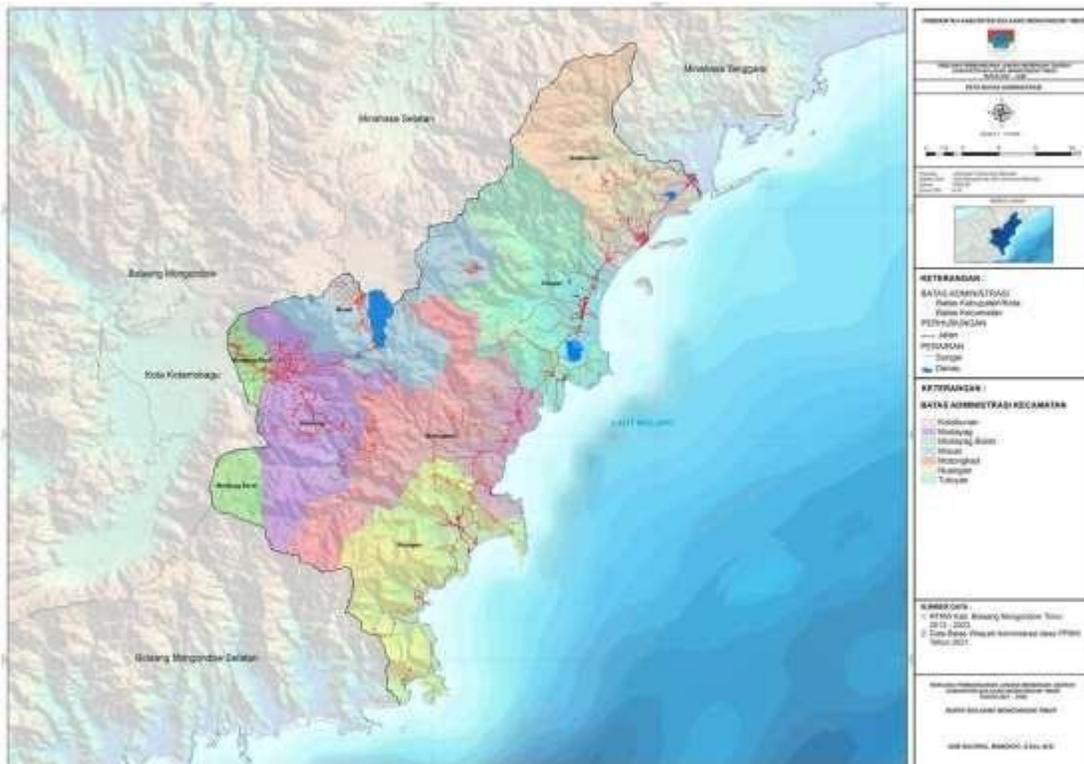
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki tiga belas pulau kecil yang direncanakan sebagai kawasan konservasi habitat ekosistem laut dan kawasan wisata alam/perikanan, yang berpotensi untuk menjadi objek wisata. Demikian juga pulau kecil yang ada di wilayah pesisir memiliki pesona wisata yang unik dan spesial. Adapun nama-nama pulau kecil tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pulau Kecil di Wilayah Pesisir
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

NO	NAMA PULAU	LUAS (Ha)
1	Pulau Racun	0,018
2	Pulau Kumeke	104,040
3	Pulau Nanas	81,446
4	Pulau Ibantong	2,808
5	Pulau Laga Besar	7,513
6	Pulau Laga Kecil	0,537
7	Pulau Ponogaguan	1,580
8	Pulau Tanjung Merah	0,671
9	Pulau Lampu	12,014
	JUMLAH	210,694

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117. Tahun

2022



Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 2024

Topografi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bervariasi dari landai, bergelombang, berbukit dan bergunung-gunung dengan ketinggian antara 0-1.775 mdpl.

Tabel 2.3
Nama, Lokasi dan Luas Danau serta Talaga di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024

NO	NAMA DANAU	LOKASI	LUAS (HA)
1	Danau Paya-Paya	Gunung Ambang	11,447
2	Danau Banga	Gunung Ambang	0,818
3	Danau Bunong	Togid	187,138
4	Danau Luak	Buyat Selatan	41,395
5	Danau Mooat	Mooat	676,116
6	Danau Tabang	Tutuyan	9,800
7	Danau Tondok	Mooat	17,411
8	Danau Pononotokan Besar	Motongkad	39,709
9	Danau Pononotokan Kecil	Motongkad	8,266
10	Danau Bombuyanoi	Pulau Nanas/Bombuyanoi	1,359
11	Danau Bombuyanoi	Pulau Nanas/Bombuyanoi	0,758
12	Danau Bombuyanoi	Pulau Nanas/Bombuyanoi	1,481
13	Talaga	Motongkad	1,526
14	Talaga	Togid	0,238
15	Talaga	Togid	1,040
16	Talaga	Tombolikat Selatan	0,049
17	Talaga	Kayumoyondi	0,041
18	Talaga	Kayumoyondi	1,661
19	Talaga	Kayumoyondi	0,018
20	Talaga	Modayag Barat	0,261
21	Talaga	Gunung Ambang	0,115
22	Talaga Boboy	Tombolikat Selatan	4,771
23	Talaga Yakub	Tombolikat Selatan	2,860

Sumber: Peta RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2013 – 2033 Dan Digitasi Peta RBI Skala 1:5.000, 2017

Potensi Pengembangan Wilayah untuk pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan Tahun 2024, masih tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah karena Peraturan Daerah tersebut masih dalam tahapan revisi.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2013-2033, arahan pemanfaatan ruang sebagai berikut:

1. Kecamatan Kotabunan merupakan Kawasan Perdagangan dan Jasa.
2. Kecamatan Tutuyan merupakan Kawasan Pusat Pemerintahan dan Pemukiman.
3. Kecamatan Nuangan dan Kecamatan Motongkad merupakan Kawasan Kelautan dan Perikanan (Minapolitan).
4. Kecamatan Modayag, Kecamatan Modayag Barat dan Kecamatan Mooat merupakan Kawasan Agropolitan.

Kawasan budidaya pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdiri dari:

1. Kawasan peruntukan wisata alam/wisata bahari; yang terletak di wilayah pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kawasan Pulau Pinonaguan/Racun, Pulau Kumeke, Pulau Bombuyanoi/Nanas, Pulau Ibantong, Pulau Laga Besar, Pulau Laga Kecil, Pulau Ponogaguan, Pulau Tanjung Merah dan Pulau Lampu, Kawasan Pegunungan, Kawasan Air Terjun, dan air panas di kawasan Gunung Ambang yang ada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Kawasan peruntukan wisata budaya; adalah wisata adat yang tersebar di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Kawasan peruntukan wisata buatan adalah wisata buatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Sektor pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada umumnya belum dikelola secara profesional, namun jika dilihat dari jumlah dan jenis obyeknya terdapat 35 (tiga puluh lima) lokasi yang sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut.

2.1.2 Keadaan Demografi

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan, jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023 yaitu 90.787 Jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,0216%, dengan sex ratio penduduk sebesar 109%, artinya setiap per 100 orang terdapat laki-laki sebanyak 109 orang. Rata-rata kepadatan penduduk Tahun 2023 adalah 104,79 Jiwa/Km². Klasifikasi jumlah penduduk dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur yaitu Kelompok Umur Usia Produktif (15-64 Tahun) yaitu 65.962 (72,66%), Kelompok Umur Usia Anak-Anak (0-14 Tahun) yaitu 18.464 (20,34%) dan Kelompok Umur Lanjut Usia (65 Tahun keatas) yaitu 6.361 (7,01%). Selengkapnya dapat disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2018-2023

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Penduduk	87.655	87.979	88.865	89.102	89.731	90.787
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	3,3	2,8	2,6	0,266	0,009	0,0216
3	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)	101,16	101,53	102,55	99	107	104,79
4	Sex ratio (L/P) (%)	109	109	109,3	109,1	109	109
Menurut Kelompok Umur							
5	0-14 Tahun (%)	16,46%	19%	21%	20,64%	18,89%	20,34%
6	15-64 Tahun (%)	76,09%	73,90%	72,95%	72,99%	73,78%	72,66%
7	Di atas 65 Tahun	7,45%	7,10%	6,05%	6,36%	7,33%	7,01%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Dinamika penduduk adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang merupakan keseimbangan antara penyebab adanya pengurangan penduduk dan juga penambahan penduduk. Salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah faktor kelahiran. Rata rata jumlah anak per keluarga merupakan tolak ukur untuk mengetahui angka kelahiran. Dilihat dari angka kelahiran total (*Total Fertility Rate = TFR*) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023 adalah 2,01 Artinya seorang wanita selama masa usia subur 15-49 Tahun melahirkan 2 anak. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup Tahun 2023 sebanyak 18.7.

Tabel 2.5
Persebaran Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023

KECAMATAN	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		(JIWA)	(%)
	(JIWA)	(%)	(JIWA)	(%)		
TUTUYAN	8.201	17,31	7.473	17,21	15.674	17,26
KOTABUNAN	8.911	18,81	8.031	18,5	16.942	18,66
NUANGAN	5.461	11,53	4.953	11,41	10.414	11,47
MODAYAG	9.798	20,68	9.166	21,11	18.964	20,89
MODAYAG BARAT	6.994	14,76	6.350	14,63	13.344	14,7
MOTONGKAD	4.213	8,89	3.890	8,96	8.103	8,93
MOOAT	3.798	8,02	3.548	8,17	7.346	8,09
TOTAL	47.376	52,18	43.411	47,82	90.787	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Distribusi/Persebaran Penduduk, Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk disuatu wilayah atau negara. Secara administratif penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan, Sebaran penduduk terpadat adalah di Kecamatan Modayag dan yang terendah adalah di Kecamatan Mooat. Komposisi Penduduk dan Populasi Masyarakat Ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Tahun 2023 memperlihatkan baik dibandingkan Tahun 2018, hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja, dan untuk pengangguran mengalami penurunan pada Tahun 2023. Jumlah angkatan kerja Tahun 2023 adalah 46.006 orang, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,23 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,35%. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

NO.	JENIS KEGIATAN UTAMA	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angkatan Kerja						
	- Bekerja	30.961	33.135	33.470	34.038	63.343	46.006
	- Pengangguran	2.760	2.254	2.272	2.169	4.469	2.598
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK	64,11	66,82	66,94	62,71	62,53	69,23
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,18	6,07	6,13	5,99	6,19	5,35

Sumber: Bolaang Mongondow Timur dalam Angka, 2024

2.1.3 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh potensinya baik potensi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah kontribusi lapangan usaha dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Fenomenanya, data *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) sektor pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merepresentasikan potensi PDRB Pariwisata yang memperlihatkan isu terkait pariwisata saat ini yaitu kesadaran dengan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam yang menjadi tumpuan industri ekstraktif, maka pemerintah dipandang perlu untuk segera mengembangkan sektor lain yang terbarukan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi (Furkan dkk., 2016). Selanjutnya data persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata dapat dilihat pada Tabel 2.7, sebagai berikut:

Tabel 2.7
Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019-2023

Uraian	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata	0,397	0,340	1.20	1.37	1.81

Sumber: Dinas Pariwisata, 2024

Tabel 2.7 memperlihatkan data dari Dinas Pariwisata Tahun 2019 sebesar 0,397% dan terus mengalami peningkatan menjadi sampai dengan Tahun 2023 sebesar 1.81%. Perlambatan terjadi pada Tahun 2019 ke Tahun 2020, karena adanya pandemi Covid-19. Kunjungan wisata ke objek wisata yang paling banyak dikunjungi yaitu Goba Molunow, Tanjung Silar, Cafe Strawberry, Gunung Ambang, Danau Mooat, Villa Mooat, Tanjung Woka, Pulau Nenas, dan Air Terjun Matabulu. Selanjutnya, Tabel 2.8 memperlihatkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Tabel 2.8
Jumlah Kunjungan Wisata
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2014-2023

Tahun Kunjungan	Jumlah Wisatawan		Total Wisatawan
	M mancanegara	Domestik	
2014	319	34.139	34.458
2015	411	45.833	46.244
2016	767	93.430	94.197
2017	965	167.339	168.304
2018	1.641	254.953	256.594
2019	1.652	319.184	320.836
2020	-	1.915	1.915
2021	-	33.510	33.510
2022	-	47.126	47.126
2023	214	68.744	68.958

Sumber: Dinas Pariwisata, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 2.8 terlihat penurunan sebesar 251.878 dari kunjungan 2019 ke kunjungan pada Tahun 2023, hal ini terjadi karena adanya pembatasan kegiatan akibat pandemi Covid-19, sehingga objek-objek wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ditutup untuk mencegah penyebaran. Baik kekayaan alam, kearifan lokal, dan keberagaman budayanya sebagai pondasi kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan yang diperkuat dengan dasar hukum yaitu Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Nomor 138 Tahun 2024 untuk penetapan 12 (duabelas) Desa Wisata dari 81 desa, yang merupakan pengewajawantahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Objek Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur maka jumlah potensi Objek Wisata yang ada di daerah ini sebanyak 61 Lokasi. Namun, seiring dengan terus diadakannya survei identifikasi potensi objek wisata maka hasil survey sampai dengan Tahun 2023 jumlah potensi objek wisata yang ada di daerah ini bertambah menjadi 85 lokasi yang klasifikasinya terdiri dari: Wisata Alam 65 Lokasi, Wisata Buatan 15 Lokasi dan Wisata Budaya 5 Lokasi, dengan jumlah kunjungan wisata baik mancanegara maupun domestik Tahun 2023 adalah 68.958 wisatawan. Dari 85 lokasi potensi objek wisata yang ada di daerah ini belum semua dikembangkan sebagai Desa Wisata.

Objek wisata yang sudah dikembangkan dan dikelola baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pihak swasta hanya berjumlah 12 lokasi. Hal ini karena masih terbatasnya anggaran yang ada, terutama pada pemerintah daerah. Adapun lokasi-lokasi objek 12 desa wisata saya yang telah dikembangkan dan sedang dikembangkan oleh pemerintah Daerah sebanyak 5 Lokasi dan pihak swasta 7 lokasi dengan rincian sebagai berikut: Objek Wisata yang dikelola oleh swasta yaitu: Objek Wisata Outbond Tobongon, Objek Wisata D'Mooat, Objek Wisata Villa Mooat, Objek Wisata Goba Molunow, Objek Wisata River View, Objek Wisata Pantai Chimoki, dan Objek Wisata Pantai Cinta. Selanjutnya, Objek Wisata yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah yaitu: Objek Wisata Danau Mooat, Objek Wisata Tanjung Silar, Objek Wisata Pantai Abadi, Objek Wisata Pantai Woka, dan Objek Wisata Diving Center.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar. yaitu umur panjang dan hidup sehat (*along and healthy life*). Pengetahuan (*knowledge*) dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup. dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarnisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Indeks Pembangunan Manusia

URAIAN	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bolaang Mongondow Timur	65.21	66.08	65.99	66.55	67.21	67,95
Sulawesi Utara	72.20	72.99	72.93	73.30	73.81	75,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terus mengalami peningkatan dari Tahun 2018-2023. pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0.74 dari Tahun 2022. Peningkatan IPM di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena pemulihan ekonomi pasca covid-19 sehingga masyarakat mampu memenuhi standar hidup layak.

Angka Kemiskinan, Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.

Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Akibatnya juga sulit untuk berkembang apalagi menjaga pariwisata berkelanjutan.

Penduduk yang yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan penduduk miskin. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Garis kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023 yaitu Rp411.409,-

Tabel 2.10
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Tahun 2012-2023

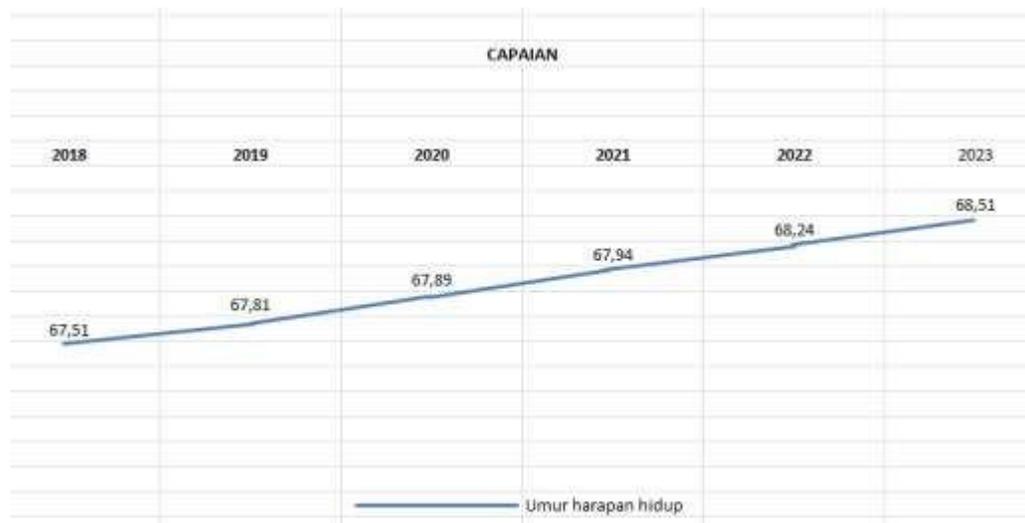
Tahun	Garis kemiskinan (rupiah)	Penduduk miskin	
		Jumlah	Presentase
2012	235.203,-	4.100	6,20
2013	237.317,-	4.640	6,92
2014	238.422,-	4.490	6,61
2015	261.715,-	4.730	6,90
2016	282.240,-	4.690	6,77
2017	293.187,-	4.370	6,20
2018	302.924,-	4.300	6,03
2019	323.989,-	4.410	6,10
2020	335.241,-	4.300	5,88
2021	353.872,-	4.470	6,10
2022	368.578,-	4.320	5,85
2023	411.409,-	4.320	5,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Secara garis besar jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat pada Tabel 2.10. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terus mengalami fluktuasi. Titik tertinggi terjadi pada Tahun 2013 sebesar 4.640 jiwa (6.92%). walaupun demikian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak termasuk dalam kategori penduduk miskin ekstrim. Berdasarkan data statistik Tahun 2024 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0.05% dari Tahun 2022 yaitu 4.320 Jiwa (5,85%) menjadi 4.320 jiwa (5.85%). Angka Umur Harapan Hidup, Umur harapan hidup merupakan salah satu komponen IPM, meskipun masih dibawah angka yang cukup baik dan meningkat dari Tahun ke Tahun. Membaiknya kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah diiringi dengan peningkatan Umur Harapan Hidup.

Berdasarkan data 12 (duabelas) tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Umur Harapan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan 2023 semakin meningkat hingga mencapai 68.51 Tahun. Angka ini berarti setiap bayi yang lahir pada Tahun 2023 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 68.51 Tahun. Peningkatan Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ini dipengaruhi karena semakin baik akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat.

Perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan. Umur Harapan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat pada Gambar 2.3.

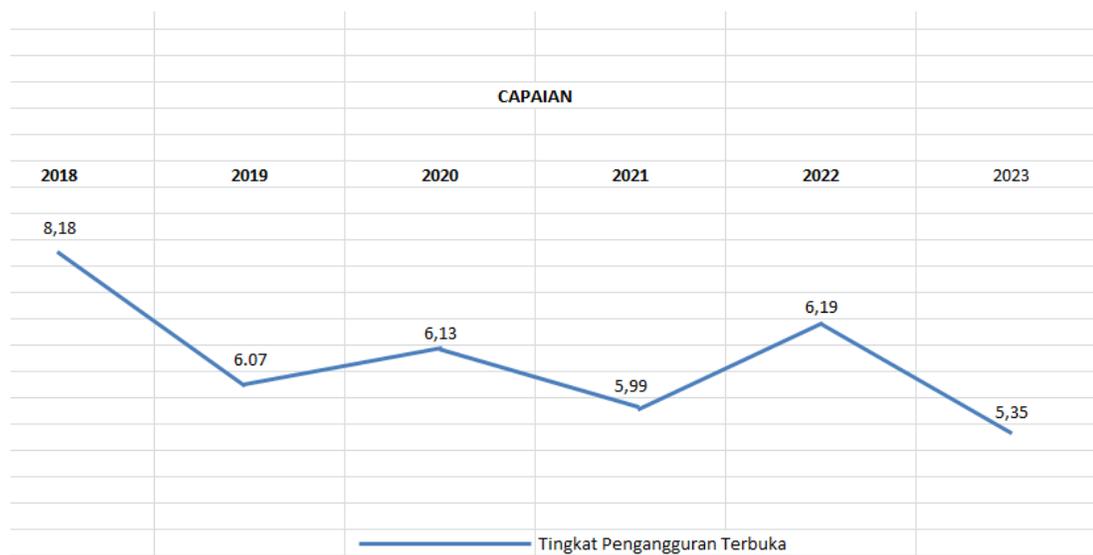


Gambar 2.3 Angka Harapan Hidup Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Angka Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan akan tetapi belum memperolehnya. Pengangguran sangat erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Semakin banyak lapangan kerja semakin tinggi juga kesempatan penduduk usia produktif untuk bekerja, pun sebaliknya. Pengangguran terjadi ketika jumlah pencari kerja lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia.

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang bekerja. Pembangunan ekonomi mampu menyerap sebagian tenaga kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur cenderung mengalami kondisi fluktuatif. Pada kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan 2023. TPT terendah mencapai 5.35% terjadi pada Tahun 2023. sementara TPT tertinggi terjadi pada Tahun 2018 yakni 8.18%. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Jumlah angkatan kerja berdasarkan data BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai Tahun 2023 sebesar 48.604 jiwa. Sedangkan jumlah pengangguran di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 2.598 jiwa. Pengangguran ini didominasi oleh penduduk dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan paling besar selisihnya yaitu pada pekerja keluarga/tak dibayar. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11

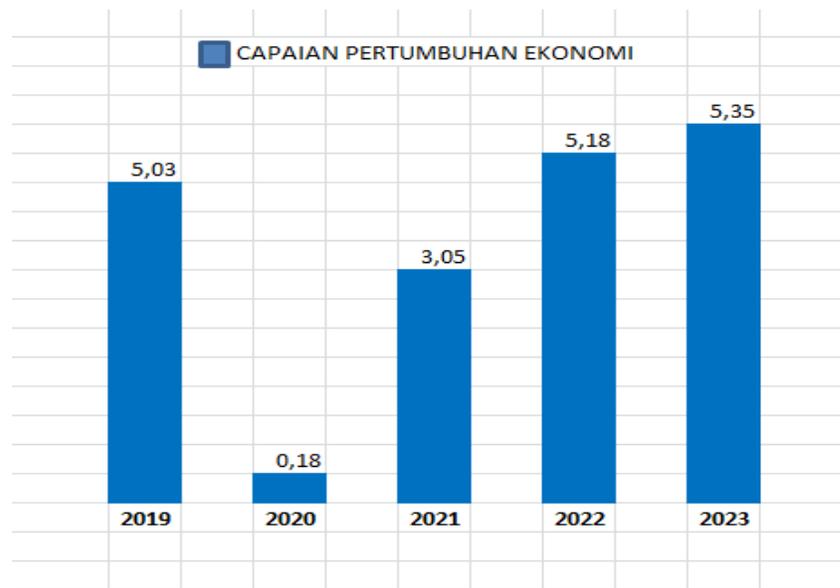
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Status pekerjaan umum	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha Sendiri	9.114	5.212	14.326
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	2.851	1.084	3.935
Berusaha dibantu butuh tetap/ buruh dibayar	2.184	1.493	3.667
Buruh/Karyawan/ Pegawai	9.378	5.093	14.471
Pekerja Bebas	7.123	1.152	8.275
Pekerja Keluarga/tak dibayar	471	2.800	3.271
Jumlah	30.028	15.978	46.006

Sumber : Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2024

2.1.5 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemajuan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi penting dalam rangka proses pembangunan adalah berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memacu pertumbuhan sektor-sektor dominan. Hal ini dilakukan dengan asumsi “proses perembesan ke bawah (*trickle down effect*)” terjadi, sehingga kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan tercapai. Kemajuan ekonomi secara makro seringkali banyak dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonominya. Secara konsepsi, PDRB menggambarkan seberapa besar proses kegiatan ekonomi (tingkat produktivitas ekonomi) di suatu wilayah, yang dihitung sebagai akumulasi dari pencapaian nilai transaksi dari berbagai sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, PDRB merupakan gambaran nyata hasil aktivitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi.



Gambar 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019-2023

Sumber: Data Olahan, 2024

Berdasarkan Tabel 2.3, lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Distribusi, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Sumber Pertumbuhan Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya distribusi persentasi laju pertumbuhan ekonomi dan sumber pertumbuhan Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut ini:

Tabel 2.12
Distribusi Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi
dan Sumber Pertumbuhan Tahun 2023

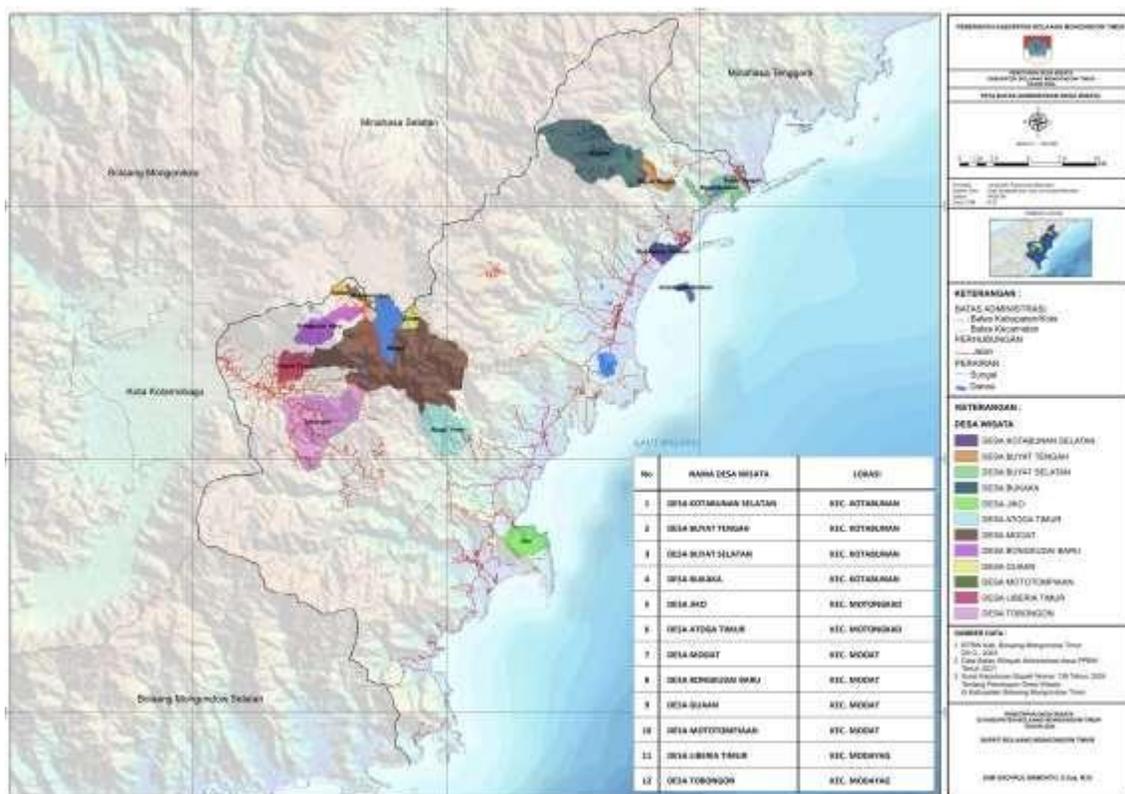
KOMPONEN PDRB LAPUS	LAJU PERTUMBUHAN PDRB LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN		
	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,88	8,99	7,13
B. Pertambangan dan Penggalian	-6,61	-1,57	-11,05
C. Industri Pengolahan	7,91	7,83	8,74
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,4	7,11	7,11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,24	1,81	7,39
F. Konstruksi	2,94	1,74	15,21
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,18	11,86	17,27
H. Transportasi dan Pergudangan	0,95	-2,79	13,34
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,20	7,71	10,43
J. Informasi dan Komunikasi	2,63	6,56	7,07
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,80	-3,70	2,69
L. Real Estate	0,65	4,58	7,02
M,N. Jasa Perusahaan	1,43	5,01	8,26
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,84	1,68	6,79
P. Jasa Pendidikan	1,39	8,32	13,61
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,93	6,95	12,35
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,02	9,98	16,95
Produk Domestik Bruto	3,05	5,18	5,35

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.1.6 Potensi Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih. Empat kondisi yang menjadi akar masalah masih belum optimalnya perkembangan pariwisata, yaitu:

- 1) Sumber daya manusia dalam mengelola objek wisata sangat terbatas;
- 2) Peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan objek wisata (RTRW/RDTR/KLHS/Perda Retribusi);
- 3) Lemahnya sistim informasi dasar yang memadai (*signal internet* yang tidak merata);
- 4) Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM terlatih yang tersedia.



Gambar 2.5. Peta 12 Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 2024.

2.2 Profil 12 Desa Wisata

DESA MOTOTOMPIAAN, visi: Terwujudnya Desa Bukaka yang Mandiri, Demokratis, Produksi, Maju, Tertib, Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Berdaya Saing. MISI 1. Mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang responsif, akuntabel dan transparan. 2. laksanakan Pembangunan Desa berdasarkan Demokrasi, Kebersamaan, serta Kemandirian. Meningkatkan sarana penunjang kebutuhan kegiatan di desa. 3. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai serta beragama. Mewujudkan ketertiban umum untuk meningkatkan rasa aman dan damai 4. Berupaya Memberdayakan Masyarakat dengan mengembangkan seluruh aspek potensial yang dimiliki Desa Mototompiaan, sehingga bisa terwujud masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Luas Wilayah Desa Mototompiaan Kecamatan Guaan adalah 866 Ha dengan Jumlah Penduduk sebanyak 715 Jiwa yang terdiri atas Laki-laki berjumlah 350 Jiwa dan Perempuan berjumlah 365 Jiwa, Berdasarkan letak geografis Desa Mototompiaan memiliki Potensi yang terbagi atas tiga sector yakni: a. Sektor Pertanian Holtikultura b. Sektor Perkebunan c. Sektor Pariwisata yaitu Permandiaan air panas.

DESA BUKAKA, visi: Terwujudnya Desa Bukaka yang Mandiri, Demokratis, Produksi, Maju, Tertib, Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Berdaya Saing. MISI: 1. Mewujudkan Pemahaman Nilai-Nilai Agama, Adat Istiadat dan Budaya 2. Mewujudkan Pemerintahan dengan tata kelola Pemerintah yang baik, menata kelola pemerintah yang bersih berkeadilan dan demokratis. Membentuk Birokrasi

yang Profesional efektif dan efisien dalam melayani masyarakat yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme 3. Mewujudkan kerja masyarakat yang kuat untuk pertumbuhan ekonom 4. Mewujudkan kondisi lingkungan yang maju dan tertib. 5. Mewujudkan peningkatan ketersediaan kualitas pertanian dan infrastruktur. Menyediakan infrastruktur yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. 6. Mewujudkan sumber daya manusia yang mampu didalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 7. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan hidup bermasyarakat berlingkungan sehat. Menyediakan sarana prasarana kesehatan dan lingkungan sehat. 8. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Luas Wilayah Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan adalah 624.000 Ha dengan Jumlah Penduduk sebanyak 469 Jiwa yang terdiri atas Laki-laki berjumlah 254 Jiwa dan Perempuan berjumlah 215 Jiwa, Berdasarkan letak geografis Desa Bukaka memiliki Potensi yang terbagi atas tiga sektor yakni: a. Sektor Pertanian b. Sektor Perkebunan c. Sektor Pariwisata yaitu Air Terjun, Pohon Pinus dan Embung.

DESA BONGKUDAI BARU, visi: memantapkan pemerintahan, pembangunan ekonomi sosial dan kemasyarakatan guna menuju bongkudai baru yang cerdas, sehat, kreatif, berwawasan lingkungan mandiri misi 1. Memantapkan kinerja pemerintahan desa bongkudai baru dalam pelayanan *smart government*. 2. Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa menuju kemandirian ekonomi meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian desa

3. Memantapkan relasi sosial masyarakat meningkatkan kegiatan sosial kemasyarakatan didesa 4. Memantapkan kualitas hidup yang sehat meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat 5. Memantapkan kualitas pendidikan dan kesehatan 6. Memantapkan sektor pertanian dan peternakan meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas luas wilayah Desa Bongkudai Baru Kecamatan Mooat adalah 500 Ha dengan Jumlah Penduduk sebanyak 522 Jiwa yang terdiri atas Laki-laki berjumlah 275 Jiwa dan Perempuan berjumlah 247 Jiwa, Berdasarkan letak geografis Desa Liberia Timur memiliki Potensi yang terbagi atas tiga sektor yakni : a. Sektor Pertanian b. Sektor Perkebunan c. Sektor Pariwisata yaitu Wisata Gunung Ambang.

DESA LIBERIA TIMUR, visi: "Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri Dan Sejahtera Serta Meningkatkan Perekonomian Masyarakat". Misi: 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik; 2. Menjadikan masyarakat Desa Liberia Timur Yang Religius; 3. Menjadikan Desa Liberia Timur yang aman dan tentram; 4. Meningkatkan hasil pertanian dan peternakan; 5. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan; 6. Membina dan menciptakan kerukunan masyarakat Desa Liberia Timur secara netral mandiri serta ketertiban dan keamanan yang kondusif. 7. Meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen RPJMDes

Luas Wilayah Desa Liberia Timur Kecamatan Modayag adalah 450 Ha dengan Jumlah Penduduk sebanyak 946 Jiwa yang terdiri atas Laki-laki berjumlah 479 Jiwa dan Perempuan berjumlah 467 Jiwa.

Berdasarkan letak geografis Desa Liberia Timur memiliki potensi yang terbagi atas tiga sektor yakni : a. Sektor Pertanian b. Sektor Perkebunan Kopi c. Sektor Periwisata yaitu Wisata Air Terjun dan Wisata Kuliner

DESA KOTABUNAN SELATAN, Visi: Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri, cerdas, sehat, kreatif, berwawasan lingkungan, yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan aparatur pemerintahan yang handal dan transparan. Misi: 1. Meningkatkan sarana prasarana disegala bidang 2. Normalisasi sarana dan prasarana disegala bidang 3. Membangun sarana prasarana yang belum ada di segala bidang 4. Meningkatkan hasil perekonomian masyarakat 5. Meningkatkan sumber daya manusia disegala bidang 6. Meningkatkan Tarap kesehatan masyarakat 7. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 8. Menyelenggarakan urusan pemerintahan secara profesional, tertib administrasi dan keuangan. 9. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan masyarakat 10. Meningkatkan kesadaran hukum dan berbudi pekerti mulia. 11. Menjadikan masyarakat kotabunan selatan cerdas, sehat dan cinta lingkungan. 12. Memberdayakan PKK desa untuk menjadikan ibu-ibu cerdas serta cinta lingkungan. Luas Wilayah Desa Kotabunan Selatan Kecamatan Kotabunan adalah 400 Ha dengan Jumlah Penduduk sebanyak 1.040 Jiwa yang terdiri atas Laki-laki berjumlah 565 Jiwa dan Perempuan berjumlah 475 Jiwa,. Berdasarkan letak geografis Desa Kotabunan Selatan memiliki Potensi yang terbagi atas tiga sector yakni: a. Sektor Perikanan b. Sektor Pertanian c. Sektor Periwisata yakni Pulau Nenas,

Wisata Mongrov dan *Diving Centre*.DESA BUYAT TENGAH, visi: “Pemantapan Pemerintahan, Pembangunan Ekonomi, Sosial Kemasyarakatan, Berbudaya, religius guna menuju Desa Buyat Tengah yang berakhlak mulia, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Terampil, Aman dan Berwawasan Lingkungan”. Misi:

1. Memantapkan Iman dan Takwa Masyarakat Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memantapkan Kesadaran Hukum, Budi pekerti Luhur dan Akhlak yang Mulia.
3. Memantapkan sumberdaya manusia yang terampil dan cerdas.
4. Memantapkan kinerja pemerintahan Desa Buyat Tengah guna pelayanan masyarakat serta menciptakan Pemerintahan yang bersih;
5. Memantapkan ekonomi masyarakat Desa Buyat Tengah melalui pemberdayaan usaha ekonomi berbasis usaha kecil dan menengah yang produktif serta Pariwisata Desa;
6. Memantapkan peran serta masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis, aman, tentram dan damai;
7. Memantapkan kualitas lingkungan hidup yang asri, sehat serta berkelanjutan;
8. Memantapkan kualitas pendidikan masyarakat Desa Buyat Tengah;
9. Memantapkan sarana prasaran pertanian yang unggul, mandiri dan tangguh;
10. Memantapkan pembangunan sarana prasarana umum Desa, dan potensi usaha Desa berbasis badan usaha milik Desa Luas Wilayah Desa Buyat Tengah Kecamatan Kotabunan adalah 96,2 Ha dengan Jumlah Penduduk sebanyak 882 Jiwa yang terdiri atas Laki-laki berjumlah 432 Jiwa dan Perempuan berjumlah 450 Jiwa

Berdasarkan letak geografis Desa Buyat Tengah memiliki Potensi yang terbagi atas tiga sector yakni : a. Sektor Perikanan b. Sektor Pertanian c. Sektor Periwisata yakni Wisata Pantai dan Tebing Bubuan.

DESA ATOGA TIMUR, Visi: membentuk masyarakat dan berahlak, menjunjung tinggi nilai nilai agama, dan budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembnagunan serta mewujudkan keseimbangan pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Misi: 1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana 3. Saling menghargai dan menghormati. 4. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang merata dan baik. 5. Menata Pemerintahan Desa Atoga Timur yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat. 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius. 7. Menjaga volume debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian. 8. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) serta bekerja sama dengan PPL untuk memfasilitasi kebutuhan Petani. 9. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah Luas Wilayah Desa Atoga Timur

Kecamatan Motongkad adalah 600 Ha dengan Jumlah Penduduk sebanyak 505 Jiwa yang terdiri atas Laki-laki berjumlah 262 Jiwa dan Perempuan berjumlah 244 Jiwa. Berdasarkan letak geografis Desa Atoga Timur memiliki potensi yang terbagi atas tiga sektor yakni: a. Sektor Perkebunan b. Sektor Pertanian c. Sektor Pariwisata Buatan Atoga River View.

DESA JIKO, Visi: Mewujudkan masyarakat Desa Jiko yang adil dan merata menuju masyarakat yang sejahtera. Misi: 1. Menjadikan masyarakat jiko yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing berdasarkan iman dan taqwa 2. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan infrastruktur desa, SDM melalui pendidikan formal maupun informal. 3. Bekerjasama dengan petugas penyuluh lapangan dan instansi teknis untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan 4. Mengurangi kesenjangan sosial dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Desa Jiko Luas Wilayah Desa Jiko Kecamatan Motongkad adalah 350 Ha dengan Jumlah Penduduk sebanyak 810 Jiwa yang terdiri atas laki-laki berjumlah 424 Jiwa dan perempuan berjumlah 384 Jiwa. Berdasarkan letak geografis Desa Jiko memiliki Potensi yang terbagi: a. Sektor Perikanan b. Sektor Pertanian c. Sektor Pariwisata Tanjung Silar dan Patokan

DESA TOBONGON, Visi: Menjadikan Desa Tobongon Berbudaya, Berdaya saing serta Mandiri, Aman dan Sejahtera. Misi: 1. Mewujudkan Desa Tobongon yang selalu melestarikan adat dan budaya Lokal 2. Menciptakan Masyarakat

Tobongon yang Aman dan Sejahtera 3. Mewujudkan Masyarakat dan Aparat Pemerintah Desa Tobongon yang Cerdas dan memiliki SDA yang handal 4. Mewujudkan masyarakat desa tobongon yang mandiri secara Ekonomi dan berdikari Luas Wilayah Desa Tobongon Kecamatan Modayag adalah 2.060 Ha dengan Jumlah Penduduk sebanyak 1.475 Jiwa yang terdiri atas Laki-laki berjumlah 773 Jiwa dan Perempuan berjumlah 702 Jiwa, Berdasarkan letak geografis Desa Tobongon memiliki potensi yang terbagi: a. Sektor Pertanian b. Sektor Perkebunan c. Sektor Pertambangan yang mendominasi.

DESA MOOAT, Visi: Membangun Desa Mooat Yang Lebih Sejahtera dan Mandiri. Misi: 1. Memberikan Pengayoman dan Pelayanan Kepada masyarakat tanpa melihat perbedaan latar belakang 2. Memberikan Pelayanan secara prima kepada masyarakat 3. Meningkatkan tupoksi pemerintah desa untuk peningkatan kinerja perangkat desa yang baik dan bersih sesuai aturan 4. Melaksanakan Pembangunan desa di semua sektor baik pertanian, sarana dan lain lain Luas Wilayah Desa Mooat Kecamatan Mooat adalah 1.321 Ha dengan Jumlah Penduduk sebanyak 652 Jiwa yang terdiri atas Laki-laki berjumlah 329 Jiwa dan Perempuan berjumlah 323 Jiwa, Dengan Kepala Keluarga berjumlah 175 KK Berdasarkan letak geografis Desa Mooat memiliki Potensi yang terbagi: a. Sektor Pertanian b. Sektor Perkebunan c. Sektor Perikanan Air Tawar d. Sektor Pariwisata terdiri atas: 1. Danau Mooat 2. Danau Tondok, dan 3. Lahan pertanian Holtikultura.